

Editorial

Model Pemberdayaan Peternak Sapi Perah Melalui Asosiasi untuk Mewujudkan Harga Susu yang Menguntungkan bagi Peternak Di Kabupaten Boyolali

Aris Fajar Rokhani

Analisis Kritis Terhadap Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Sebagai Cikal Bakal Bank Pertanian Indonesia

Bot Pranadi

Keripik Paru Nabati dari Kulit Singkong Menjadi Home Industri Telomoyo Putra

Novi Elia Rachmawati

Korelasi Antara Kelas Kelompoktani dengan Persepsi Peternak Terhadap Inovasi Fermentasi Pakan Hijauan Pada Peternak Kambing Kaligesing

Wahyudi

Membangun Kelembagaan Petani yang Bankable dalam Mendukung Program Swasembada Daging

Sutiyo Purwono

Prospek Pengembangan Ternak Sapi dan Kerbau di Kabupaten Pemalang Mendukung Program Swasembada Daging

Nurul Ashar

Edisi Khusus



K

T

I

(Karya Tulis Ilmiah)
Penyuluh Pertanian





EDITORIAL

Penanggung Jawab:
DR. Ir. Moh. Ismail Wahab, MS.

Ketua Redaksi:
Herwinarni Endah Mumpuni

Anggota Redaksi:
Forita Dyah Arianti,
Ariarti Tyasdjaja,
Wahyudi Hariyanto,
Indrie Ambarsari

Design Grafis:
Dadang Suhendar

Dok. Foto :
Eko Budi Prayitno

Administrasi:
Parti Khosiyah

Alamat:
Jl. BPTP No. 40 Sidomulyo Ungaran;

Telp. : 024-6924965;

Faximile: 024-6924966;

Website:
<http://jateng.litbang.pertanian.go.id>;

email:
bptp-jateng@litbang.pertanian.go.id;

Penerbit:
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
(BPTP) Jawa Tengah.

Sumber Dana : DIPA 2014

Warta Inovasi kali ini terbit dalam Edisi Khusus untuk memuat Karya Tulis Ilmiah (KTI) para penyuluh pertanian Provinsi Jawa Tengah yang telah terpilih menjadi yang terbaik dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah bagi Penyuluh Pertanian se Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan BPTP Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu. Karya tulis terbaik yang dimuat di Warta Inovasi merupakan eksplorasi penyuluh tentang fenomena pembangunan pertanian yang terjadi di wilayah kerjanya.

Eksplorasi penyuluh terhadap inovasi teknologi pertanian maupun kelembagaan yang berkembang di wilayah kerjanya merupakan informasi yang berharga dalam rangka mengembangkan sektor pertanian. Penyuluh pertanian sebagai garda terdepan baik dalam menyampaikan informasi kepada petani maupun memberikan umpan balik tentang kondisi riil di lapangan kepada penentu kebijakan dan penghasil inovasi teknologi pertanian merupakan posisi yang strategis dalam pembangunan pertanian.

Pandangan dan pendapat para penyuluh pertanian menjadi penting mengingat kedekatan mereka dengan petani, sehingga sejatinya dapat mengungkap apa yang diinginkan dan dibutuhkan petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Permasalahan dan kebutuhan petani dalam mendukung produksi dan produktivitas pertanian merupakan kunci sukses program pertanian di Indonesia. Karya tulis ilmiah ini dapat menjadi alternatif wahana yang bermanfaat bagi penyuluh pertanian untuk menyalurkan ungkapan permasalahan dan kebutuhan petani kepada masyarakat pada umumnya dan bagi penentu kebijakan pembangunan pertanian pada khususnya.

Torehan karya penyuluh pertanian yang berasal dari pengalaman lapangan, kajian, observasi, dan studi pustaka dalam kemasan ilmiah ini diharapkan mampu memberikan motivasi dan manfaat untuk meningkatkan profesionalisme para pejabat fungsional khususnya penyuluh pertanian. Di samping itu juga dapat menjadi informasi yang bermanfaat dalam pelaksanaan pembangunan pertanian di masa sekarang maupun yang akan datang. Akhirnya, Edisi Khusus KTI penyuluh pertanian ini sebagai upaya nyata dalam meningkatkan jejaring antara penyuluh, peneliti, petani, maupun petugas yang terkait dengan pembangunan pertanian.

MODEL PEMBERDAYAAN PETERNAK SAPI PERAH MELALUI ASOSIASI UNTUK MEWUJUDKAN HARGA SUSU YANG MENGUNTUNGKAN BAGI PETERNAK DI KABUPATEN BOYOLALI



Aris Fajar Rokhani

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali
Email : arisrokhani@yahoo.co.id

Abstrak

Kabupaten Boyolali merupakan daerah utama penghasil susu di Provinsi Jawa Tengah. Namun harga susu di tingkat peternak masih rendah. Hal ini dikarenakan lemahnya posisi tawar peternak dalam tataniaga susu di Kabupaten Boyolali. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh model asosiasi untuk mewujudkan harga susu yang menguntungkan di tingkat peternak. Penelitian dilakukan pada bulan April 2014 di empat kecamatan yaitu Kecamatan Selo, Musuk, Mojosongo, dan Ampel. Metode penelitian adalah mixed method yaitu penggabungan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dilakukan dengan mengambil sampel peternak yang tergabung dalam asosiasi secara proportionate random sampling. Pengambilan sampel menggunakan rumus

Kountur. Penjelasan secara detil mengenai fenomena sosial yang terjadi dalam sampel digambarkan secara kualitatif dengan metode penelitian diskriptif. Pengambilan data melalui metode survei dilakukan dengan wawancara terhadap responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asosiasi berpengaruh signifikan terhadap harga susu di tingkat peternak sebesar $T: 0,00$ dan nilai $Z: -2,988$. Harga susu di tingkat peternak tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan produksi susu. Meskipun demikian, adanya asosiasi mendapat respon positif karena menguntungkan peternak dan mencerminkan perjuangan peternak.

Kata kunci: asosiasi peternak, harga susu, Boyolali

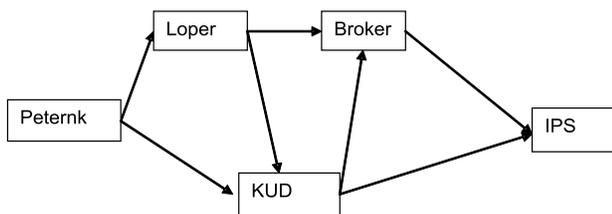
PENDAHULUAN

Pertumbuhan permintaan susu nasional mencapai 1,6% per tahun. Sayangnya, tingginya permintaan susu dan pertumbuhan kebutuhan susu nasional tersebut masih belum dapat dipenuhi oleh peternak sapi perah dalam negeri. Menurut data Kementerian Pertanian Republik Indonesia (2011), peternak sapi perah dalam negeri hanya mampu memasok 30% dari kebutuhan susu nasional.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi susu nasional terkendala dengan harga susu di tingkat peternak yang masih rendah. Harga susu di tingkat peternak sapi perah bervariasi antara Rp 2.800,- hingga Rp. 3.800,- per liter. Permintaan susu yang tinggi tidak diikuti dengan tingginya harga susu. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kualitas susu yang dihasilkan di tingkat peternak dan juga sistem tataniaga susu itu sendiri. Pada workshop persusuan di Kabupaten Boyolali Tahun 2013 disebutkan bahwa masalah di tingkat peternak adalah pemerahan dan penyakit ternak seperti mastitis. Sedangkan permasalahan di tingkat sistem tataniaga adalah panjangnya alur distribusi dan posisi tawar peternak yang lemah.

Produksi susu di Kabupaten Boyolali mencapai 80.000-90.000 liter/hari, sedangkan populasi sapi perah mencapai 61.749 ekor (Boyolali dalam Angka, 2012). Potensi peternakan sapi perah tersebut masih belum mampu memberikan kehidupan ekonomi yang layak kepada peternak. Harga susu yang rendah menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi keengganan peternak untuk meningkatkan produksi susu. Usaha pembesaran dan penggemukan sapi kini lebih menarik minat peternak, karena dinilai lebih menguntungkan dibandingkan usaha produksi susu sapi. Kondisi ini dapat menyebabkan kemunduran bagi usaha peternakan sapi perah di Kabupaten Boyolali.

Harga susu yang diterima oleh peternak sangat ditentukan pada alur tataniaga susu dan sistem pasar yang terjadi dari tataniaga tersebut. Alur tataniaga susu di Kabupaten Boyolali ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur Tataniaga Susu (Laporan dan Kajian Tim Kluster Persusuan Propinsi Jawa Tengah, 2010)

Gambar 1 memperlihatkan panjangnya alur tataniaga susu dari peternak ke Industri Pengolahan Susu (IPS). Peternak harus melalui tahapan loper-KUD dan broker yang setiap tahapan merupakan biaya sehingga harga susu yang diterima peternak rendah. Sebagai gambaran harga susu di tingkat IPS mencapai Rp. 4.800,- per liter sampai di tingkat peternak hanya Rp. 3.300,- per liter.

Permasalahan yang kedua berkaitan dengan sistem pasar. Pasar susu cenderung oligopoli dimana harga susu ditentukan oleh KUD dan loper. Peternak tidak memiliki posisi tawar yang kuat terhadap pasar. Pada wilayah dimana tidak ada persaingan pasar antar pengumpul atau kelompok peternak, maka harga susu yang diterima peternak cenderung rendah. Sebaliknya apabila terjadi persaingan pasar antar pengumpul susu atau kelompok peternak, maka harga susu cenderung tinggi.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, kelompok tani atau gabungan kelompok tani berkedudukan di tingkat desa. Kondisi ini tidak memungkinkan untuk menciptakan persaingan pasar dalam tataniaga susu. Oleh karena itu diperlukan organisasi peternak yang menaungi dan bekerja di tingkat kabupaten/kota yaitu asosiasi komoditas pertanian.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pemberdayaan peternak sapi perah dalam bentuk asosiasi untuk mewujudkan harga susu yang menguntungkan bagi peternak. Usaha asosiasi dilakukan untuk memotong panjangnya alur distribusi tataniaga susu dan menciptakan persaingan pasar yang sehat. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah setempat dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan tataniaga susu.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2014 di empat kecamatan di Kabupaten Boyolali, yaitu: Kecamatan Selo, Ampel, Musuk, dan Mojosongo. Lokasi penelitian ditetapkan secara "purposive" sedangkan pemilihan responden dilakukan secara acak proporsional (random sampling). Responden yang dilibatkan dalam penelitian merupakan semua peternak sapi perah yang tergabung dalam Asosiasi Peternak Sapi Perah (ASPIRAH) Boyolali.

Data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui survei dengan menggunakan kuesioner. Pengumpulan data sekunder dari dinas/instansi terkait meliputi monografi, populasi sapi perah, jumlah kelompok, peternak tiap KUD, jumlah kepemilikan sapi dan standar kualitas susu IPS.

Penentuan jumlah peternak yang digunakan sebagai sampel dapat dihitung dengan rumus penentuan sampel menurut Kountur (2003) yaitu :

$$n = \frac{NZ^2\sigma^2}{Nd^2 + Z^2\sigma^2}$$

Keterangan :

- N** : Besarnya sampel yang diambil
- Z** : Luas area kurve normal
- σ** : Simpangan Baku
- D** : Derajat penyimpangan
- n** : Jumlah Anggota dalam Populas

Analisis data secara kuantitatif dilakukan dengan menggunakan metode Wicoxon Match Pairs Test (Martono, 2010) dengan rumus sebagai berikut :

$$Z = \frac{T - \frac{1}{4}n(n+1)}{\sqrt{\frac{1}{24}n(n+1)(2n+1)}}$$

Keterangan :

- Z** : Nilai uji signifikansi
- T** : Nilai T Tabel
- n** : Jumlah sampel sebagai responden

Pengolahan data menggunakan program SPSS 18. Analisis diskriptif dilakukan untuk menjelaskan fenomena sosial mengenai pengaruh asosiasi terhadap harga susu di TPS. Tujuannya adalah memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi, hubungan dan proses yang sedang berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi dan Diskripsi Responden Boyolali

Kabupaten Boyolali merupakan sentra produksi susu. Dengan populasi sapi perah sebanyak 61.749 ekor dan produksi susu sebesar 32.400.000 liter/tahun atau rata-rata 88.767 liter/hari (Disnakan, 2010) menjadikan Kabupaten Boyolali sebagai pemasok utama susu di Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional.

Populasi sapi perah tersebar di enam kecamatan pengembangan sapi perah yaitu Kecamatan Ampel, Selo, Cepogo, Musuk, Boyolali, Mojosongo dapat dilihat pada Tabel 1. Berdasarkan data tersebut, populasi sapi perah maupun produksi susu tertinggi di Kabupaten Boyolali terdapat di Kecamatan Mojosongo.

Tabel 1. Jumlah populasi sapi perah dan produksi susu di beberapa kecamatan Kabupaten Boyolali

Kecamatan	Populasi Sapi Perah	Produksi Susu (Liter/Tahun)
Ampel	2.868	2.570.000
Selo	2.998	1.100.000
Cepogo	11.303	5.900.000
Musuk	19.772	12.320.000
Boyolali	2.759	1.200.000
Mojosongo	22.438	12.820.000

Sumber: Disnakan Kabupaten Boyolali (2010)

Responden sebanyak 11 orang merupakan peternak yang tergabung dalam Asosiasi Peternak Sapi Perah (Aspirah). Sebelum keberadaan asosiasi, rata-rata produksi susu mencapai 6,39 liter/ekor/hari atau 19,18 liter/orang/hari. Hasil tersebut masih sangat rendah karena menurut Sugeng (2006) produksi susu sapi PFH dapat mencapai 20-30 liter/hari. Jumlah kepemilikan sapi di tingkat peternak rata-rata adalah 3 ekor/peternak. Kondisi ini menunjukkan bahwa peternakan di Kabupaten Boyolali merupakan peternakan rakyat dengan jumlah kepemilikan sapi sangat rendah. Menurut Surat Keputusan Menteri Pertanian (1990), peternakan rakyat merupakan usaha sampingan dengan kepemilikan sapi perah laktasi kurang dari 10 ekor sapi laktasi. Jumlah kepemilikan ternak laktasi yang sedikit ini membuat pengelolaan usaha ternak sapi hanya menjadi usaha sampingan saja.

Asosiasi dan Pengaruh Harga Susu di Tingkat Peternak

Gambaran harga susu di tingkat peternak tercerminkan dari harga susu yang diterima responden. Tabel 2 menunjukkan bahwa adanya kenaikan harga susu di tingkat peternak sesudah adanya asosiasi.

Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 18 dengan metode Wilcoxon Match Pairs Test (Tabel 3) menunjukkan nilai T sebesar 0,00 dan nilai Z sebesar -2,988. Sedangkan nilai T Tabel sebesar 11 dan nilai Z Tabel sebesar 1,98. Angka tersebut menunjukkan bahwa harga susu antara sebelum dan sesudah asosiasi berpengaruh secara signifikan pada tingkat kepercayaan 95%.

Tabel 2. Harga sebelum, sesudah keberadaan ASPIRAH dan marginnya

No responden	Harga susu sebelum (Rp/liter)	Harga susu sesudah (Rp/liter)	Margin (Rp)
1	2500	4500	2000
2	2500	4500	2000
3	2400	4500	2100
4	2500	4500	2000
5	2500	4500	2000
6	2500	4300	1800
7	2500	4500	2000
8	3000	4350	1350
9	2600	4500	1900
10	2400	4500	2100
11	2500	4500	2000

Tabel 3. Nilai T dan Z untuk harga susu

	Jumlah Res	Rata-rata Rank	Nilai T
harga setelah asosiasi	Negative	0 ^a	,00
harga sebelum asosiasi	Positive	11 ^b	66,00
	Ranks		
	Nilai Z	0 ^c	-2,988 ^b
	Total	11	

Sebelum keberadaan Aspirah harga susu ditentukan oleh KUD atau looper yang merupakan satu-satunya pasar penjualan susu dari peternak. Kondisi pasar yang demikian menjadikan harga susu di tingkat peternak menjadi rendah. Keberadaan asosiasi menjadikan persaingan harga susu semakin sempurna karena peternak memiliki alternatif lain dalam penjualan susu, sehingga memungkinkan untuk terjadinya peningkatan harga susu. Widodo (2006) mengemukakan bahwa pasar persaingan sempurna adalah pasar dengan ciri-ciri dimana banyak terdapat pembeli dan penjual, barang yang diperdagangkan bersifat homogen, informasi pasar lengkap, dan harga ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran.

Asosiasi dan Pengaruh Terhadap Produksi Susu

Susu dihasilkan dari sapi perah ditunjukkan pada Tabel 4. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa secara umum tidak terjadi peningkatan produksi susu di tingkat peternak. Hanya 5 responden dari 11 responden yang mengalami kenaikan produksi susu.

Tabel 4. Pengaruh keberadaan asosiasi terhadap produksi susu di Boyolali

No responden	Produksi susu sebelum (liter/orang)	Produksi susu sesudah (liter/orang)	Margin (liter)
1	20	20	0
2	50	50	0
3	5	14	9
4	0	20	20
5	75	75	0
6	9	25	16
7	7	16	9
8	13	13	0
9	6	6	0
10	6	12	6
11	20	20	0

Hasil analisis statistik menggunakan Wilcoxon Match Pairs Test menunjukkan angka T hitung sebesar 10 dan lebih kecil dari angka tabel sebesar 11 atau $T_{hitung} < T_{tabel}$. Hasil analisis statistik untuk produksi susu pada Tabel 5 menunjukkan bahwa keberadaan asosiasi tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi susu ($Z_{hitung} \leq Z_{tabel}$). Tidak signifikannya pengaruh asosiasi terhadap produksi susu diduga karena populasi sapi belum bertambah.

Tabel 5. Nilai T dan Z produksi susu

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Jumlah susu sesudah-jumlah susu sebelum	Negative Ranks	0 ^a	,00	,00
	Positive Ranks	4 ^b	2,5	10,00
	Nilai Z Total	6 ^c		-1,841
		10		

Dampak Asosiasi

Secara umum, responden memberikan tanggapan positif terhadap keberadaan asosiasi. Keberadaan asosiasi dinilai sangat membantu dan menguntungkan peternak karena mampu mengangkat harga susu di tingkat peternak. Menurut responden, keberadaan KUD dan loper kurang menguntungkan peternak. Persepsi tersebut terbentuk karena harga susu yang diterimakan KUD dan loper kepada peternak rendah. Sebagian peternak memiliki anggapan bahwa KUD dan loper hanya mengejar keuntungan.

Keberadaan asosiasi menjadi antitesa KUD dan loper karena asosiasi dicerminkan sebagai representasi peternak yang memperjuangkan kepentingan peternak. Karena itulah keberadaan asosiasi lebih mudah diterima di kalangan

peternak. Asosiasi diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 dimana asosiasi komoditas pertanian bertugas menampung dan menyalurkan aspirasi Petani, mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan Usaha Tani;

KESIMPULAN DAN SARAN

Keberadaan asosiasi peternak sapi perah (Aspirah) Boyolali berpengaruh signifikan terhadap harga susu di tingkat peternak. Namun, keberadaan asosiasi tidak berpengaruh terhadap produksi susu di tingkat peternak. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam dan luas tentang pengaruh asosiasi terhadap produksi susu di tingkat peternak. Selain itu, pemerintah perlu mengatur keberadaan asosiasi secara lebih detil dan jelas sehingga keberadaan asosiasi benar-benar merepresentasikan peternak dan memperjuangkan peternak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bupati Boyolali. 2012. Boyolali Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, Boyolali.
- Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali. 2010. Data Statistik Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali, Boyolali.
- Kountur, R. 2003. Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. CV Taruna Grafika, Jakarta.
- Martono, N. 2010. Statistik Sosial Teori dan Aplikasi Program SPSS. Gava Media, Jogjakarta.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013. Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani. Jakarta.
- Widodo, T.S. 2006. Ekonomi Indonesia Fakta dan Tantangan di Era Liberalisasi. Kanisius, Yogyakarta.



ANALISIS KRITIS TERHADAP PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN SEBAGAI CIKAL BAKAL BANK PERTANIAN INDONESIA



Bot Pranadi

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Wonogiri
Email: pranadi77@gmail.com

Abstrak

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi sektor pertanian di Indonesia adalah keterbatasan akses petani terhadap modal. Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang diarahkan dapat menumbuhkan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) merupakan terobosan strategis Kementerian Pertanian untuk mengatasi permasalahan tersebut. Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis memiliki potensi dan peluang yang besar menjadi Bank Pertanian berbasis ekonomi kerakyatan. Penumbuhan LKMA menjadi Bank Pertanian sesuai dengan skenario pola

Credit Agricole yang menganut asas partisipasi masyarakat. Pola ini menjadikan petani sebagai pelaku utama, bukan “korban” dari pembangunan. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan reorientasi tujuan dan sasaran LKMA menjadi lembaga keuangan yang bernafas bisnis sosial, serta melakukan perubahan tugas dan fungsi organisasi pelaksana sampai tingkat kecamatan sehingga memiliki tanggung jawab untuk membentuk LKMA menjadi lembaga keuangan yang sehat dan profesional.

Kata Kunci: PUAP, LKMA, bank pertanian, ekonomi kerakyatan

Kajian ADB tersebut menunjukkan bahwa jika pemerintah mampu mendekatkan sumber pembiayaan pertanian kepada petani dan menyesuaikan model pembiayaan dengan karakteristik petani serta dikelola dengan manajemen yang baik, maka kesulitan akses modal petani dapat diatasi. Secara konseptual, PUAP memiliki potensi untuk menghilangkan hambatan akses tersebut karena Gapoktan sebagai pengelola (Direktorat Pembiayaan Pertanian, 2013) adalah kelembagaan milik petani dan berlokasi di sekitar tempat tinggal petani sehingga memahami kehidupan petani sebagai pelaku. Mudah-mudahan akses pembiayaan akan berdampak pada peningkatan pendapatan petani.

Konsep pemberdayaan masyarakat melalui PUAP ini mulai menuai hasil. Caesarion (2011 cit. Anggriani, 2012) menyatakan bahwa setelah adanya bantuan program PUAP kinerja usaha kecil pertanian menjadi lebih efektif. Variabel yang digunakan adalah kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan usaha tani; pengembangan agribisnis perdesaan; pengembangan usaha mikro; dan peran pendampingan. Selain itu, kajian yang dilakukan oleh Anggriani (2012) pada Gapoktan Rukun Tani, Kab. Bogor menunjukkan bahwa intervensi program PUAP mengakibatkan peningkatan rata-rata pendapatan per kapita per bulan sebanyak Rp. 62.653,- atau 76,48%. Untuk memperoleh gambaran riil perubahan pendapatan, diperhitungkan pula inflasi efektif dari tahun 2010 sampai Agustus 2012 saat pelaksanaan penelitian, yaitu 14%. Dengan demikian, dibandingkan dengan keadaan tahun 2009 maka rata-rata pendapatan per kapita per bulan meningkat sebesar Rp. 44.898,- atau sekitar 54,80%.

Dilihat dari beberapa perspektif di atas, PUAP memiliki potensi yang besar untuk terus dikembangkan, karena: 1) Dikelola dan dijalankan oleh masyarakat petani sebagai pelaku, 2) Mampu mengatasi permasalahan tempat dan hambatan psikologis petani untuk mendatangi lembaga perkeditan (LKMA-PUAP), 3) Mampu memberikan efek positif terhadap pendapatan petani dan kinerja usaha kecil pertanian, 4) Jika dikelola dengan baik dan disertai pendampingan kepada petani, akan mampu meminimalisir Enam Faktor Penghambat Akses Kredit yang dikemukakan ADB, 5) Bisa diarahkan untuk menjadi Lembaga Keuangan Mikro profesional yang menjadi pusat penggerak ekonomi masyarakat, 6) Memiliki potensi menjadi cikal bakal Bank Pertanian Indonesia.

PUAP sebagai Cikal Bakal Bank Pertanian

Kementerian Pertanian melalui Permentan 82 tahun 2013 telah menetapkan gabungan kelompok tani (Gapoktan) sebagai kelembagaan ekonomi petani di perdesaan. Gapoktan penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUAP, diarahkan untuk menumbuhkan LKMA sebagai salah satu unit usaha Gapoktan. Kebijakan Gapoktan PUAP menumbuhkan LKMA merupakan langkah strategis Kementerian Pertanian dalam menanggulangi persoalan pembiayaan petani skala mikro dan buruh tani yang jumlahnya cukup besar di perdesaan (Badan PSDMP, 2010). Menurut Syukur (2009 cit. Ashari, 2010) alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan pembiayaan pertanian dapat dilakukan dengan mendukung pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) atau jika memungkinkan mendirikan Bank Pertanian. LKMA dipilih karena memiliki beberapa keunggulan diantaranya: 1) kemudahan akses, 2) proses yang cepat, 3) prosedur relatif sederhana, 4) berdasar budaya setempat dan dekat dengan lokasi usaha, serta 5) pengelola LKM lebih memahami dan mengenal karakter petani (nasabah).

Pembentukan LKMA di tingkat Gapoktan ini sebenarnya sejalan dengan skenario pemerintah yang memiliki keinginan untuk membentuk Bank Pertanian Indonesia. Sehubungan dengan itu, ada beberapa skenario rancang bangun pembentukan Bank Pertanian Indonesia,

yaitu: 1) pola pendirian credit-agricole Perancis, 2) pola pendirian Bank Bukopin, 3) Foreign Direct Investment, 4) mendorong bank Badan Usaha Milik negara (BUMN) menjadi bank pertanian, dan memanfaatkan lembaga keuangan yang tumbuh dan berkembang di tingkat lokal (Ashari dan Friyatno, 2006).

Apabila dikelola dengan baik, pembentukan ribuan LKMA saat ini akan sesuai dengan skenario kesatu, yaitu: pola pendirian credit-agricole Perancis. Salah satu negara yang pernah dijadikan kajian adalah Perancis yang memiliki bank pertanian yang disebut Credit Agricole. Pembentukan Credit Agricole dimulai dari fase pemberdayaan lembaga keuangan mikro lokal (caise lokal) sampai terbentuknya caise regional dan caise national. Proses tersebut menjadi inspirasi Kementerian Pertanian untuk mewujudkan dukungan yang optimal bagi pembangunan pertanian (Direktorat Pembiayaan, 2004). Dalam skenario tersebut petani melalui Gapoktan dan organisasi lainnya akan bertindak sebagai pengelola dan pemegang saham utama, sedangkan Kementerian Pertanian melalui lembaga akan menjadi pemegang saham di samping pemegang saham yang lainnya.

Skenario Credit Agricole layak untuk dieksekusi mengingat pembentukan Bank Pertanian secara langsung tidaklah mudah karena terbentur dengan berbagai aspek yaitu : biaya, infrastruktur, peraturan, kajian kelayakan. Selain itu skenario pola credit agricole memiliki kekuatan karena sesuai dengan prinsip partisipatif dan keterlibatan petani sebagai aktor. Pola tersebut menganut asas Ekonomi Kerakyatan. Menurut Bashwir (2010), yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi adalah suatu keadaan dimana, "produksi dikerjakan oleh semua untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat." Kepemilikan bersama ini dirasa perlu untuk mencegah pergeseran marwah asli dari Bank Pertanian yang ingin dibentuk. Apabila Bank Pertanian hanya dikuasai oleh segelintir pemilik modal, maka tujuannya akan bergeser dari pemberdayaan pengentasan kemiskinan menjadi mencari laba sebanyak-banyaknya. Konsep penumbuhan Bank Pertanian dengan pola dari bawah ini juga dilontarkan oleh penggerak Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Winarno dan Habib (2006), pendirian bank pertanian dapat diinisiasi dari pembentukan Lembaga Keuangan Milik Petani (LKMP). Secara empirik Indonesia memiliki 24 juta petani, dengan jumlah anggota per LKMP 100 orang maka dapat terbentuk 240 ribu LKMP. Dengan asumsi aset tiap LKMP sebesar Rp 25 juta, maka secara nasional mempunyai aset Rp. 6 triliun. Jika aset LKMP ini dijadikan satu lembaga induk, maka lembaga induk ini dapat berupa Bank Pertanian, karena dari aset yang ada lebih dari cukup sebagai syarat minimal untuk membentuk sebuah bank.

PUAP dan Permasalahan yang Melingkupinya

Salah satu kelemahan mendasar konsep PUAP dan berbagai program lainnya adalah kurang terlihatnya keterkaitan antara tujuan dengan indikator keberhasilan yang dirumuskan dalam tahapan dan program yang dilaksanakan. Dalam tujuan PUAP dengan jelas disebutkan bahwa program ini diharapkan mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan. Sementara itu dalam indikator keberhasilan yang terkait dengan outcome hanya disebutkan meningkatnya pendapatan petani, buruh tani dan rumah tangga tani dalam berusaha tani sesuai dengan potensi daerah (Jamal, 2008). Dengan indikator yang tidak terperinci tersebut sulit untuk menilai keberhasilan program dan menjaga keberlangsungannya.

Mengembangnya indikator program tersebut juga berpengaruh pada pengukuran kinerja Penyelia Mitra Tani (PMT) dan Penyuluh sebagai pendamping program PUAP. Jika kinerja bank atau lembaga perkreditan diukur dari ketercapaian laba, kemacetan, dan pengembangan usaha,

PENDAHULUAN

Sektor pertanian memiliki peran yang sangat strategis bagi pembangunan Indonesia. Meskipun demikian, sektor ini masih menyisakan permasalahan yang belum selesai hingga kini. Permasalahan mendasar yang dihadapi petani adalah kurangnya akses kepada sumber permodalan, pasar dan teknologi serta organisasi tani yang masih lemah (Kementerian Pertanian, 2013). Untuk melayani kebutuhan modal, kita perlu mengembangkan ketersediaan dana yang dapat diakses dengan mudah. Mekanisme peminjaman dan proses pengembaliannya juga harus diatur lebih bijaksana lagi, sehingga terjadi keadilan, maksudnya petani sebagai pengusaha mikro diharapkan akan sama haknya dengan pengusaha besar (Hafsah, 2006)

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan program terobosan Kementerian Pertanian untuk menanggulangi kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah pusat dan daerah serta kesenjangan antar subsektor (Anggriani, 2012). Pada tahun 2008 PUAP menargetkan berkembangnya usaha agribisnis di 10.000 desa miskin atau tertinggal melalui pengembangan kegiatan usaha di 10.000 Gabungan Kelompok Tani atau Kelompok Tani yang dikelola petani (Jamal, 2008). Pada tahun 2011, dari target 10.000 desa, kegiatan PUAP berhasil dilaksanakan di 9.096 Desa/Gapoktan (Kementerian Pertanian, 2011). Selain berkembangnya usaha agribisnis, Kementerian Pertanian melalui program PUAP juga ingin menumbuhkan LKMA di perdesaan untuk mengatasi permasalahan kesulitan mendapatkan modal usaha tani bagi petani.

Kredit Pertanian di Indonesia

Sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penopang perekonomian Indonesia masih menghadapi kendala sulitnya akses kepada permodalan. Kelangkaan permodalan, kredit pertanian berpengaruh terhadap produktivitas dan pendapatan petani. Oleh karena itu gagasan untuk memberikan kredit kepada petani muncul dalam berbagai bentuk. Skim kredit yang telah dikembangkan adalah Kredit Ketahanan Pangan (KKP) yang kemudian berubah menjadi Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Skim kredit KKP-E, KPEN-RP, KUPS adalah skim kredit program dengan subsidi bunga, sementara KUR adalah skim kredit program dengan penjaminan. Dana kredit sepenuhnya berasal dari bank pelaksana (Kementerian Pertanian, 2011). Namun pelaksanaan fasilitas pembiayaan skim kredit masih jauh dari harapan. Tingkat penyaluran kredit kepada petani masih sangat rendah, hanya berkisar antara 4-18% dari total komitmen bank (Tabel 1). Program KPEN-KP hanya tersalurkan 4,7% terhadap komitmen bank, terendah diantara program lainnya.

Alokasi kredit perbankan kepada petani termasuk rendah, karena permintaan kredit sektor pertanian yang dianggap belum memenuhi syarat-syarat pemberian kredit

yang ditetapkan oleh perbankan (Adam, 2012). Dalam pemberian kredit, pihak perbankan mempunyai persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Pihak perbankan sangat berhati-hati dalam memberikan kredit agar kreditur tidak mengalami gagal bayar. Selain permasalahan persyaratan dan agunan yang seringkali sulit dipenuhi oleh petani, hasil kajian Badan Litbang Pertanian (2008 cit. Ashari, 2009) menunjukkan bahwa secara umum kendala penyaluran kredit ke sektor pertanian adalah kurang sesuai karakteristik usaha di sektor ini dengan iklim usaha di perbankan. Kondisi ini mengakibatkan sektor pertanian cenderung tidak menjadi prioritas dalam penyaluran kredit oleh perbankan. Oleh karena itu perlu dibentuk lembaga pembiayaan khusus pertanian.

Kehadiran lembaga pembiayaan khusus sektor pertanian di Indonesia dapat dikategorikan sangat mendesak. Hal ini setidaknya dilandasi beberapa argumen. Pertama, sektor pertanian mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional, seperti dalam menyerap tenaga kerja, sumber pangan, pemasok bahan baku industri, sumber devisa. Jika ada dukungan permodalan yang memadai di sektor pertanian, maka peran sektor ini akan dapat lebih ditingkatkan. Kedua, potensi pembiayaan yang sangat besar disektor pertanian baik dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), maupun peluang bisnisnya. Ketiga, masih minimnya alokasi kredit untuk sektor pertanian, sehingga masih terbuka peluang usaha yang sangat besar untuk ekspansi pasar kredit pertanian karena belum mengalami kejenuhan (Ashari, 2010).

Potensi Pengembangan PUAP

Hasil studi Asian Development Bank/ ADB (2004 cit. Ashari dan Friyatno, 2006) menyatakan bahwa ketidakmampuan akses petani terhadap lembaga kredit disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah: (a) physical acces; kendala akses karena jauhnya lembaga-lembaga kredit keuangan di perdesaan atau yang disebut Rural Financial Institution (RFIs), (b) eligibility; usahatani petani, usaha non pertanian kecil dan kegiatan rumah tangga tidak memenuhi syarat secara perbankan (tidak bankable), (c) business opportunities; kesempatan bisnis di pedesaan rendah sehingga akses ke perbankan menjadi rendah pula, (d) internal problems within the RFIs; rendahnya akses petani pedesaan terhadap bank disebabkan oleh permasalahan yang ada dalam RFIs itu sendiri, (e) information and facilities linkages; kurangnya informasi dan fasilitas pendukung antara apa yang terjadi di perkotaan sebagai pusat bisnis barang dan jasa sehingga petani di perdesaan tidak dapat menyediakan barang dan jasanya di perkotaan, sehingga akses petani ke perbankan menjadi rendah, yang semestinya difasilitasi oleh perbankan sebagai tanggung jawab bank untuk menjaga

konduktivitas nasabahnya sendiri, (f) interest rate ratio; walaupun sudah diakui bahwa kesalahan masa lalu yang kurang mendidik adalah karena pemberian subsidi bunga, namun jika suku bunga yang ada dipandang terlalu tinggi tetap harus ada upaya agar lebih rendah. Untuk selanjutnya faktor-faktor tersebut akan disebut sebagai "Enam Faktor Penghambat Akses Kredit"

Tabel 1. Komitmen Bank, Realisasi Serapan, Cakupan Komoditas Kredit Program Tahun 2011 di Indonesia (per Oktober 2011)

No	Skim Kredit	Cakupan Komoditas	Komitmen Bank (Rp. Triliun)	Realisasi (Rp. Triliun)	% Terhadap Komitmen Bank
1	KKP-E	Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Pengadaan Pangan	8,779	1,589	18,1
2	KPEN-RP	Sawit, Kakao, Karet	38,603 *)	1,818	4,7
3	KUPS	Pembibitan Sapi	3,882 *)	0,392	10,1
4	KUR	Semua usaha produktif semua sektor	20,000	3,993 **)	16,4

Keterangan: *) Komitmen Bank untuk KPEN-RP tahun 2007-2014 dan KUPS tahun 2009-2014

***) Realisasi KUR untuk sektor pertanian. Realisasi KUR untuk semua sektor usaha Rp. 24,404 triliun

Sumber: Kementerian Pertanian (2011)

tetapi kinerja pendamping hanya diukur dari berjalannya program dan kelengkapan administrasi tanpa melihat apakah potensi ekonomi LKMA telah teroptimalkan. Akibatnya LKMA berjalan tanpa memiliki target dan tujuan yang tepat. Masing-masing LKMA berpotensi berjalan sesuai dengan persepsinya masing-masing karena ketiadaan panduan dan alat pengukur keberhasilan LKMA.

Dari segi teknis, menurut Martowijoyo (2002 cit. Ashari, 2006), lemahnya kinerja keuangan dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu: 1) rendahnya tingkat pelunasan kredit; 2) rendahnya moralitas aparat pelaksana; dan 3) rendahnya tingkat mobilisasi dana masyarakat. Kelemahan tersebut membawa konsekuensi pada tidak berlanjutnya lembaga keuangan yang terbentuk setelah program selesai. Akibatnya, peserta program umumnya akan kembali mengalami kekurangan modal usaha. Ketiga aspek lemahnya kinerja keuangan tersebut secara terpisah terungkap dalam Workshop Penumbuhan LKMA pada Gapoktan PUAP di Jawa Timur pada tanggal 29-30 Agustus 2012. Beberapa permasalahan yang terungkap dalam Workshop tersebut adalah: 1) masih banyaknya kredit macet sehingga pengurus Gapoktan merasa belum siap untuk membentuk LKMA; 2) SDM pengurus Gapoktan rata-rata berusia lanjut sehingga tidak optimal dalam menjalankan Gapoktan; 3) intervensi yang bersifat negatif dari Perangkat Desa pada program PUAP cukup tinggi; 4) sebagian pengurus dan penyuluh pendamping belum memahami LKMA dan pengelolaannya; 5) Gapoktan belum mampu memberikan gaji yang memadai kepada pengelola LKMA; 6) perbedaan pendapat mengenai legalitas LKMA terjadi di dalam tim pendamping (Penyuluh, PMT dan Tim Teknis), karena tidak adanya panduan yang baku dari PUAP nasional; 7) masih banyak pengelolaan BLM-PUAP yang disalurkan melalui poktan sehingga mempersulit pembentukan LKMA di Gapoktan; 8) masih banyaknya anggapan masyarakat bahwa dana BLM-PUAP adalah hibah (setara BLT) yang tidak perlu dikembalikan; 9) adanya ketidakseragaman dalam pengelolaan dana BLM PUAP akibat tidak ada dan atau tidak efektifnya pelatihan bagi pengurus Gapoktan maupun pendamping (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, 2012). Secara umum, permasalahan yang terungkap dalam Workshop tersebut juga terjadi pada wilayah yang lain.

Rancang Bangun Kelembagaan PUAP

Arus pemikiran pendekatan pola pembangunan sedang mengarah ke pola bottom up. Pola yang dianggap mampu membuka partisipasi masyarakat sehingga inisiatif dan keterlibatan masyarakat lebih dihargai. Soetrisno (1987) menyatakan bahwa pada sistem manajemen dari bawah, faktor-faktor kultural setempat bukan lagi harus “menyesuaikan” pada program pembangunan, melainkan sebaliknya, program pembangunanlah yang harus menyesuaikan dengan aspirasi dan tata kultural setempat. Dengan kata lain, para manajer pembangunan diharapkan tidak lagi melihat masyarakat perdesaan sebagai ruang hampa yang tidak memiliki pranata sosial yang mapan.

Pola partisipasi masyarakat ini sangat menjiwai program PUAP. Hal ini dibuktikan dengan 1) tidak adanya panduan yang detail mengenai pengelolaan simpan pinjam dan LKMA., sehingga diserahkan pada masyarakat setempat; 2) pola penyusunan rencana anggaran berjenjang dari bawah melalui Rencana Usaha Anggota, Rencana Usaha Kelompok, dan diakhiri dengan Rencana Usaha Bersama; 3) tidak adanya panduan arah pengembangan organisasi sehingga berkembang sesuai kultur masyarakat setempat. Namun pada pelaksanaannya, pola manajemen dari bawah secara penuh kurang tepat karena keterbatasan yang ada pada tingkat wilayah tidak dapat dihindari. Keterbatasan yang dimaksud adalah permasalahan - permasalahan yang sudah dibahas sebelumnya, seperti: lemahnya kemampuan SDM, pengetahuan tentang LKMA, dan lemahnya manajemen

operasional. Pada aspek-aspek tersebut, pemerintah semestinya memberikan panduan dan mekanisme yang jelas. Beberapa hasil penelitian menunjukkan dampak pola manajemen dari bawah pada PUAP berlebihan. Hasil riset yang dilakukan Martiana et. al. (2012) di Desa Pertampilen, Desa Salam Tani dan Desa Tiang Layar, Kabupaten Deli Serdang menunjukkan bahwa tingkat pengembalian PUAP di ketiga wilayah tersebut termasuk kategori macet. Penelitian Anggriani (2012) juga mengungkapkan bahwa total dana PUAP yang mengalami kemacetan pada Gapoktan Rukun Tani, Desa Citapen Kabupaten Bogor sebesar 6,85%. Jika menggunakan standard keuangan LKM, maka nilai ini tergolong tinggi. Selain itu tingkat efisiensi LKMA juga tergolong rendah. Penelitian Saleh et. al. (2012) di Kabupaten Bantul mengungkapkan bahwa hanya 29,23% LKMA yang bekerja dengan efisien, sedangkan 70,77% beroperasi secara inefisien selama tahun 2011. Hal ini menunjukkan meskipun PUAP berdampak pada peningkatan petani, tetapi potensi kemacetan dan rapuhnya kekuatan lembaga menjadikan LKMA vulnerable untuk tidak berkesinambungan. Rapuhnya lembaga ini disebabkan kurangnya infrastruktur penguatan dari pemerintah, sehingga LKMA berjalan seadanya. Tentu saja muncul satu harapan bahwa kasus kegagalan KUT yang menjerat utang 13.488 koperasi dengan total tunggakan Rp. 5.805 trilyun (Sufyadi, 2012) tidak terjadi lagi pada pengelolaan LKMA- PUAP. Oleh karena itu pendekatan yang dilakukan sebaiknya adalah gabungan antara bottom up dan top down. Masyarakat berperan sebagai pelaku, penentu norma, dan penggerak masyarakat; sedangkan pemerintah berperan dalam pendampingan, penyusunan standar teknis umum, pemberian modal, dan kebijakan.

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah perlu merevisi struktur Organisasi Pelaksana PUAP. Pemerintah perlu membuat Tim PUAP otonom yang terdiri dari praktisi-praktisi perbankan/ keuangan mikro dan praktisi Lembaga Swadaya Masyarakat bidang Pemberdayaan yang bertanggung jawab secara penuh untuk pengembangan PUAP. Gagasan ini diadopsi dari pendapat Bashwir (2010) saat mengajukan pola reformasi BUMN. Tim PUAP Otonom bertanggung jawab untuk mengembangkan LKMA tidak hanya sebagai unit pemberdayaan, tetapi juga sebagai unit bisnis yang berkembang seperti halnya lembaga keuangan profesional. Bisnis dan pemberdayaan tidaklah bertolak belakang. Dalam konsep Sosial Entrepreneur, bisnis yang dilakukan dalam rangka pengembangan masyarakat. Hal ini dibuktikan oleh Muhammad Yunus, pendiri Grameen Bank di Bangladesh, sebagai salah satu social entrepreneur yang mampu menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat kurang mampu tidak hanya menghasilkan kesejahteraan dalam konteks sosial, namun juga mampu mendatangkan keuntungan finansial (Aliano, 2013). Semakin besar bisnis kelembagaan berkembang, semakin banyak masyarakat yang bisa diantarkan dari kemiskinan, karena modal yang dimiliki juga berkembang semakin banyak. Apabila LKMA dikembangkan sebagai unit Bisnis Sosial, maka aspek bisnisnya harus terus dikuatkan. Pengukuran keberhasilan tidak hanya diukur dari jumlah pelaksanaan PUAP, tetapi juga diukur dengan standard LKMA sebagai lembaga keuangan, termasuk laba, tingkat kemacetan, aset, modal, dan performa keuangan.

Tim PUAP Otonom ini memiliki peran yang lebih besar daripada Organisasi Pelaksana PUAP yang tercantum pada Pedoman Pelaksanaan PUAP 2013. Apabila Organisasi pelaksana yang terdiri dari : tim PUAP Pusat, sekretariat PUAP, Tim pembina PUAP provinsi, sekretariat Provinsi, Tim Teknis Kabupaten/ Kecamatan/ Desa, PMT banyak ditekankan pada proses administratif dan pendampingan pelaksanaan PUAP saja, maka Tim PUAP Otonom selain menangani proses administratif juga memastikan bahwa LKMA berjalan selayaknya bisnis lembaga keuangan, namun tetap menganut azas bisnis sosial. Artinya Tim PUAP Otonom bertanggung jawab dalam pembentukan LKMA,



pembentukan standard LKMA yang layak dan sehat, menetapkan target dan strategi pertumbuhan laba, dan melakukan pengawasan dan audit keuangan selayaknya perbankan profesional. Sekali lagi, profesional tanpa meninggalkan azas pemberdayaan. Karena justru pemberdayaan yang profesional yang akan efektif dan efisien.

Tim PUAP Otonom ini diturunkan hingga tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Artinya Penyelia Mitra Tani yang saat ini ada, akan menjadi bagian dari Tim PUAP daerah. Bekerja penuh waktu selayaknya perbankan profesional, bertanggung jawab untuk mengembangkan LKMA, termasuk administrasi, pelaksanaan teknis dan strategi lapangan, pelaporan dan pencapaian target bisnis sosial (growth LKMA), termasuk target keuangan. Berbeda dengan kenyataan di lapangan saat ini dimana PMT menganggap pekerjaannya sebagai pekerjaan sampingan, sehingga perkembangan LKMA juga tidak bisa maksimal. Rincian kerja PMT pada Tim PUAP Otonom ini tidak tercantum pada Petunjuk Teknis Pendamping PUAP 2013. Pada pedoman tersebut, PMT hanya berperan sebagai pendamping administratif dan pendamping pelaksanaan, namun belum memiliki peran sebagai pemacu kinerja bisnis LKMA.

Sesuai dengan prinsip Bisnis Sosial, maka menurut Ashari dan Friyatno (2006) Bank Pertanian diharapkan tidak hanya menyediakan pembiayaan melalui skim kredit pertanian, tetapi juga menyentuh aspek non-ekonomis yaitu meningkatkan sikap bisnis dan pengetahuan petani, serta membantu petani dalam merancang dan mengurus proyek-proyek pertanian dalam usaha tani. Artinya dalam pelaksanaan harus ada pendamping agar bantuan yang diberikan efektif dalam pengentasan kemiskinan. Apabila dalam Petunjuk Teknis Pendamping PUAP 2013, penyuluh terlibat dalam proses bisnis dan pelaporan keuangan LKMA, maka ke depan sebaiknya penyuluh hanya difokuskan pada pendampingan kelembagaan Gapoktan, teknologi pertanian dan agribisnis. Ini bertujuan agar bantuan kredit yang diberikan kepada petani mampu dipergunakan tepat sasaran sehingga meningkatkan pendapatan bagi petani. Dampaknya

adalah kemacetan kredit dapat ditekan. Aspek keuangan dan proses bisnis menjadi domain dari PMT. Pemisahan ini perlu dilakukan mengingat penyuluh pertanian di lapangan dituntut menjadi dokter semua masalah agribisnis, mulai dari budidaya, hama penyakit, pengolahan, maupun saprodi, distribusi. Tentu pengetahuan tentang lembaga keuangan mikro pada kalangan penyuluh sangat sedikit. Tuntutan untuk mengetahui semua hal mengurangi efektifitas pendampingan keuangan dan bisnis LKMA oleh penyuluh. Spesialisasi tentang administrasi keuangan dan bisnis LKMA lebih layak jika ditangani oleh PMT. Semua ini perlu

dilakukan untuk menjadikan LKMA sebagai unit bisnis sosial yang sehat, layak, dan berkembang sebagai lembaga perkreditan petani. Jika LKMA mampu berkembang sejajar dengan perbankan nasional, maka akan berimbang pada kemajuan sektor pertanian. Selain itu, apabila LKMA yang ada saat ini sehat dan mampu menggairahkan ekonomi pertanian, maka penggabungan menjadi Bank Pertanian Indonesia akan menghasilkan Bank Pertanian yang sehat. Sebaliknya apabila LKMA saat ini menjadi LKMA yang sakit, maka Bank Pertanian yang dihasilkannya pun akan sakit dan tidak memiliki dampak apa-apa bagi sektor pertanian, selain kegagalan yang terulang.

Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan

Mimpi adanya Bank Pertanian yang mampu menjawab permasalahan pembiayaan pertanian selayaknya mulai direalisasikan. Program PUAP yang diarahkan menumbuhkan LKMA memiliki potensi yang besar untuk menjadi cikal bakal Bank Pertanian Indonesia. Pengembangan LKMA sesuai dengan skenario pola Credit Agricole dari Perancis yaitu kelembagaan keuangan tumbuh mulai dari tingkat bawah, dan bersatu di tingkat nasional. Pola ini memiliki keunggulan karena menjiwai prinsip Ekonomi Kerakyatan. Format LKMA dirasa paling tepat karena mampu mengatasi enam faktor penghambat akses modal petani versi ADB, yaitu: 1) akses fisik, 2) pemenuhan syarat perbankan, 3) kesempatan bisnis, 4) permasalahan internal, 5) informasi dan fasilitas pendukung, 6) bunga yang sesuai karakteristik petani.

Dalam upaya membentuk Bank Pertanian yang sehat, pemerintah harus melakukan intervensi agar permasalahan mendasar yang ada pada program PUAP-LKMA dapat teratasi. Selain itu intervensi dengan gabungan pola bottom up - top down diperlukan untuk menumbuhkan LKMA yang ada menjadi lembaga keuangan yang sehat dan memiliki orientasi Bisnis Sosial. Dari LKMA yang sehat inilah akan terwujud Bank Pertanian yang kuat dan mampu memberikan dampak pada pembangunan pertanian.

Beberapa langkah yang harus ditempuh adalah : 1) Revisi pedoman pelaksanaan pusat dan mereorientasi tujuan dan sasaran program PUAP, 2) Membentuk Tim PUAP otonom yang terdiri dari praktisi perbankan dan aktivis pemberdayaan dengan tugas utama membangun dan menumbuhkan LKMA menjadi lembaga keuangan yang sehat dan memiliki growth bisnis yang baik, 3) Merevitalisasi peran PMT dan penyuluh, dan menempatkan PMT sebagai pendamping utama yang bekerja penuh waktu, dan berfungsi sebagai perpanjangan tangan Tim PUAP Otonom, 4) Membuat panduan yang telah disesuaikan dengan Undang-undang yang terkait dengan LKMA, seperti UU Koperasi, UU LKMA, dan peraturan-peraturan terkait.



DAFTAR PUSTAKA

- Adam, L. 2012. Urgensi Pembentukan Bank Pertanian. Analisis Kebijakan Pertanian 10(2): 103-117
- Anggriani, T.W. 2012. Analisis Dampak Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP): Studi Kasus Gapoktan Rukun Tani, Desa Citapen, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Tesis. Universitas Indonesia. Jakarta
- Asian Development Bank. 2004. Agriculture and Rural Development Strategy Studi Dalam Perspektif Pendirian Bank Pertanian di Indonesia. Ashari dan S. Friyatno. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor
- Ashari dan S. Friyatno. 2006. Perspektif Pendirian Bank Pertanian di Indonesia. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 24 (2):107-155. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor
- Ashari. 2009. Peran Perbankan Nasional dalam Pembiayaan Sektor Pertanian di Indonesia. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 27 (1): 13-27. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor
- Ashari. 2010. Pendirian Bank Pertanian di Indonesia: "Apakah Agenda Mendesak". Analisis Kebijakan Pertanian 8 (1): 13-27. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.
- Badan Litbang Pertanian. 2008. Karakteristik Perbankan (Pengertian, Fungsi, dan Ruang Lingkup Usaha Bank) Dalam Peran Perbankan Nasional Dalam Pembiayaan Sektor Pertanian di Indonesia. Ashari. Forum Penelitian Agro Ekonomi 27 (1): 13-27. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor
- Badan PSDM Pertanian. 2010. Petunjuk Teknis Peningkatan (Rating) Gapoktan PUAP Menuju LKMA. Kementerian Pertanian. Jakarta
- Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. 2012. Hasil Workshop Penuhungan LKMA pada Gapoktan PUAP di Jawa Timur. Malang
- Bashwir, R. 2010. Ekonomi Kerakyatan vs Neoliberalisme. Delokomotif. Yogyakarta.
- Caesarion, Rio. 2011. Efektifitas Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) terhadap Kinerja Usaha Kecil di Kabupaten Lampung Selatan Dalam Analisis Dampak Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP): Studi Kasus Gapoktan Rukun Tani, Desa Citapen, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Anggriani, T.W. Tesis. Universitas Indonesia. Jakarta
- Direktorat Pembiayaan. 2004. Kelembagaan dan Pola Pelayanan Keuangan Mikro untuk Sektor Pertanian (Pedoman dan Kebijakan). Direktorat Pembiayaan, Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian, Departemen Pertanian, Jakarta.
- Direktorat Pembiayaan Pertanian. 2013. Petunjuk Teknis Penyuluh Pendamping PUAP. Kementerian Pertanian. Jakarta
- Hafsah, M.J. 2006. Kedaulatan Pangan. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Jamal, E. 2008. Kajian Kritis Terhadap Pelaksanaan Pembangunan perdesaan. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 26(2): 92-102
- Kementerian Pertanian. 2011. Laporan Kinerja Kementerian Pertanian 2011. Jakarta
- Kementerian Pertanian. 2013. Peraturan Menteri Pertanian NOMOR 08/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan.
- Martiana, Hasudungan, dan Jufri. 2012. Monitoring dan Evaluasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Kecamatan Pancur Batu. Kabupaten Deli Serdang. Fakultas Pertanian USU
- Martowijoyo, S. 2002. Dampak Pemberlakuan Sistem Bank Perkreditan Rakyat terhadap Kinerja Lembaga Pedesaan Dalam Potensi Lembaga Keuangan Mikro dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya. Ashari. 2006. Analisis Kebijakan Pertanian 4(2): 146-164
- Noviar, Aliano. 2013. Kajian tentang bisnis sosial. <http://alianooranoviar.blogspot.com/2013/08/kajian-tentang-bisnis-sosial-social.html>, diakses 22 Juni 2014.
- Saleh, Y. Mulyo, J.H, dan Waluyati, L.R. 2012. Efisiensi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gabungan Kelompok Tani dalam Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan: Studi Kasus di Kabupaten Bantul. Jurnal Agro Ekonomi 30(2):129-144
- Soetrisno, L. 1987. Kredit Pedesaan di Indonesia. BPFE. Yogyakarta
- Sufyadi, D. 2012. Kebijakan Kredit Pertanian: Kasus Kredit Usaha Tani. <http://dedisufyadi.blogdetik.com>, diakses 22 Juni 2014
- Syukur, M. 2009. Mencari Alternatif Pembiayaan Pertanian Dalam Pendirian Bank Pertanian di Indonesia: "Apakah Agenda Mendesak". Ashari. Analisis Kebijakan Pertanian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.
- Winarno T dan H. Habib. 2006. Lembaga Keuangan Milik Petani sebagai Cikal Bakal Bank Pertanian dalam Keragaan Pemanfaatan dan sumber Pinjaman Usaha Tani Padi Sawah. Darwis, V. dan Iqbal, M. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.



KERIPIK PARU NABATI DARI KULIT SINGKONG MENJADI HOME INDUSTRI TELOMOYO PUTRA



Novi Elia Rahmawati

Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan
Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang
Email: novielia54@gmail.com

Abstrak

Makanan kecil hasil olahan dari singkong sudah diketahui dan banyak dijumpai di pasaran, akan tetapi jika produk olahan tersebut dibuat dari kulit singkong mungkin masih banyak yang belum mengenal. Kulit singkong merupakan limbah yang jarang dimanfaatkan, ternyata dapat diolah menjadi makanan yang enak yang diberi nama pembuatnya dengan keripik paru nabati. Pembuatan keripik kulit singkong harus dilakukan melalui beberapa proses/tahapan terutama untuk menghilangkan racun HCN yang terdapat didalam kulit singkong. Oleh karena itu perlu dilakukan pengamatan/ observasi terhadap pemanfaatan kulit singkong menjadi produk makanan ini. Pengamatan/ observasi ini bertujuan untuk (a) mengetahui dan memahami proses pengolahan keripik paru nabati; (b) mengembangkan produk unggulan bernilai ekonomis tinggi dengan bahan dasar kulit singkong; (c) mengetahui pangsa pasar keripik paru nabati serta respon konsumen; dan (d) mengetahui kualitas hasil keripik paru nabati

dengan metode dan jenis bahan yang berbeda. Kegiatan dilaksanakan di Dusun Purwogondo, Desa Sumurarum, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang mulai bulan Maret sampai Juni 2013 dengan menggunakan metode pengamatan/ observasi dan praktek langsung, pengujian penggunaan kulit singkong dari 2 varietas singkong, dan pengujian 2 macam pengolahan. Hasil pengamatan/ observasi menyatakan bahwa kulit singkong dapat dimanfaatkan menjadi produk makanan yang bernilai ekonomis tinggi, respon masyarakat terhadap produk keripik paru nabati relatif tinggi, kulit singkong dari varietas rengganis menjadi pilihan utama sebagai bahan baku, proses pengolahan dengan pencelupan kulit singkong ke dalam adonan tepung bumbu sebelum penggorengan I dan II menghasilkan produk yang lebih baik dengan warna, aroma, rasa dan kerenyahan yang lebih disukai konsumen.

Kata kunci : keripik paru nabati, kulit singkong

PENDAHULUAN

Singkong (*Manihot utilissima*) yang dalam bahasa Jawa mempunyai nama pohung, telo, jendal merupakan komoditas yang dapat diolah menjadi berbagai macam produk, baik produk basah sampai produk kering yang disukai semua kalangan mulai dari orang dewasa hingga anak-anak. Daunnya dapat disayur dan dibuat rolade, keripik daun singkong dan geprek daun singkong. Singkongnya diolah menjadi singkong rebus, singkong goreng, kolak singkong, gethuk, klemet, klenyem, gemblong/cothot/gatot, sawut, tiwul, ongol-ongol dan masih banyak lainnya. Sedangkan produk keringnya biasanya berupa keripik atau cering, mulai dari cering singkong, slondok, pothil, klathak, lentheng, samier, rengginang dan yang lainnya. Produk-produk di atas sering dijumpai di pasaran dan tidak asing lagi, namun jika produk olahan yang dibuat dari kulit singkong mungkin masih banyak yang belum mengenali.

Seorang petani pengolah hasil dari Desa Sumururum terinspirasi untuk memanfaatkan kulit singkong agar mempunyai nilai ekonomis dengan membuat keripik kulit singkong tanpa menghilangkan bentuk aslinya. Keripik kulit singkong ini dinamakan Keripik Paru Nabati. Dinamakan paru nabati karena bentuk dan penampilan keripik mirip dengan paru sapi, sedangkan nabati diambil karena dibuat dari bahan nabati yaitu kulit singkong. Kulit singkong menjadi pilihan karena di wilayah Desa Sumururum banyak produsen slondok yang kulitnya tidak dimanfaatkan. Pembuatan keripik kulit singkong harus dilakukan melalui beberapa proses/tahapan terutama untuk menghilangkan racun HCN yang terdapat didalam kulit singkong. Oleh karena itu perlu dilakukan pengamatan/ observasi terhadap pemanfaatan kulit singkong menjadi produk makanan yang enak dan bernilai ekonomi.

Pengamatan/ observasi ini bertujuan untuk (a) Mengetahui dan memahami proses pengolahan keripik paru nabati; (b) Mengembangkan produk unggulan bernilai ekonomis tinggi dengan bahan dasar limbah kulit singkong; (c) Mengetahui pangsa pasar keripik paru nabati serta respon konsumen; dan (d) Mengetahui kualitas hasil Keripik Paru Nabati dengan metode dan jenis bahan yang berbeda. Di samping itu, hasil pengamatan/ observasi ini diharapkan juga dapat memberikan gambaran kepada Penyuluh dan Petani tentang pemanfaatan limbah untuk produk bernilai ekonomis tinggi serta sebagai umpan balik (feed back) guna pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pengolahan hasil pertanian khususnya pemanfaatan limbah.

TINJAUAN PUSTAKA

Keripik

Keripik atau kripik adalah sejenis makanan ringan berupa irisan tipis dari umbi-umbian, buah-buahan, atau sayuran yang digoreng di dalam minyak nabati. Untuk menghasilkan rasa yang gurih dan renyah biasanya dicampur dengan adonan tepung yang diberi bumbu rempah tertentu.

Tabel 1. Perbedaan antara keripik, kurupuk dan rempeyek

Pengolahan	Keripik	Kerupuk	Rempeyek
Dengan tepung	Ya dan tidak	Ya	Ya
Isi olahan	Bahan diiris tipis	Bahan baku dihancurkan	Biji-bijian, ikan teri, udang
Cara Penggorengan	Manual dan Vacuum Fryer	Manual	Manual
Penjemuran bahan	Tidak	Ya	Tidak
Rasa baku	Asin, gurih	Asin, gurih	Asin, gurih

Secara umum keripik dibuat melalui tahap penggorengan, tetapi ada pula dengan hanya melalui penjemuran, atau pengeringan. Keripik dapat berasa dominan asin, pedas, manis, asam, gurih, atau paduan dari kesemuanya.

Singkong

Ketela pohon, ubi kayu, atau singkong (*Manihot utilissima*) adalah perdu tahunan tropika dan subtropika dari suku Euphorbiaceae. Kandungan utamanya adalah pati dengan sedikit glukosa sehingga rasanya sedikit manis. Pada keadaan tertentu, terutama bila teroksidasi, akan terbentuk glukosida racun yang selanjutnya membentuk asam sianida (HCN). Sianida ini akan memberikan rasa pahit. Umbi yang rasanya manis menghasilkan paling sedikit 20 mg HCN per kilogram umbi segar, dan 50 kali lebih banyak pada umbi yang rasanya pahit. Proses pemasakan dapat secara efektif menurunkan kadar racun.

Kulit Singkong

Kulit singkong merupakan bagian singkong yang selama ini dianggap tidak penting bahkan selalu dibuang ialah bagian kulit umbi singkong. Kulit singkong mengandung nutrisi yang bisa dimanfaatkan oleh tubuh dan tentunya aman jika dikonsumsi. Nutrisi utama yang banyak terkandung dalam kulit singkong ialah karbohidrat. Beberapa manfaat lain yang bisa diperoleh dari pemanfaatan kulit singkong, antara lain :

- Sebagai Pupuk Organik
- Pakan Ternak
Kandungan karbohidrat yang tinggi dapat mempermudah petani menghasilkan hewan ternak yang gemuk.
- Bio energy
Teknologi yang diterapkan untuk menghasilkan bioethanol yakni melalui proses bernama hidrolisa asam dan juga enzimatis.
- Olahan Makanan
Umumnya, kulit singkong diolah menjadi keripik.

(<http://akardanumbi.blogspot.com/2013/01/-manfaat-kulit-singkong.html>)

Kulit singkong sering kali dianggap limbah yang tidak berguna oleh sebagian industri berbahan baku singkong. Oleh karena itu, bahan ini masih belum banyak dimanfaatkan dan dibuang begitu saja dan umumnya hanya digunakan sebagai pakan ternak. Persentase kulit singkong kurang lebih 20% dari umbinya sehingga per kg umbi singkong menghasilkan 0,2 kg kulit singkong. Kulit singkong lebih banyak mengandung racun asam biru dibanding daging umbi yakni 3-5 kali lebih besar, tergantung rasanya yang manis atau pahit (Salim, 2011:79-80).

Kulit singkong yang dianggap sebagai sampah ternyata mempunyai kandungan gizi yang cukup tinggi. Dalam 100 gram kulit singkong mengandung protein 8,11 gram; serat kasar 15,20 gram; pektin 0,22 gram; lemak 1,29 gram; kalsium 0,63 gram. Hal itu merupakan salah satu kelebihan dari kulit singkong, dan kekurangan kulit singkong adalah adanya kandungan racun alami yang biasa disebut HCN. Kandungan racun HCN dapat berkurang melalui beberapa perlakuan, diantaranya dengan cara perebusan, perendaman, pemanasan, pengeringan dan fermentasi (Rukmana, 1997).

Tabel 2. Kandungan Nutrisi Kulit Singkong

Bahan kulit kering	Protein	Pektin	Serat kasar	Lemak	Ca
17,45 gr	8,11 gr	0,22 gr	15,20 gr	1,29 gr	0,63 gr

METODOLOGI

Pembuatan Keripik Paru Nabati dilaksanakan di rumah Bapak Ismono, Dusun. Purwogondo, Desa Sumurarum, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang mulai bulan Maret sampai Juni 2013. Bahan yang digunakan adalah kulit singkong, tepung beras, tepung tapioka, kemiri, ketumbar, bawang putih, garam, air dan minyak goreng serta beberapa peralatan antara lain untuk merendam, merebus dan menggoreng.

Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan metode pengamatan/ observasi dan praktek langsung di lokasi mulai dari penyiapan bahan baku sampai dengan produk akhir, pengujian perbedaan penggunaan kulit singkong dari 2 varietas singkong, pengujian perbedaan pengolahan menggunakan 2 macam pemberian bumbu. Data yang diperoleh selain dari pengamatan/ observasi langsung, juga diperoleh dengan wawancara kepada narasumber. Hasil praktek dan pengamatan selanjutnya dicatat untuk materi penulisan kegiatan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pengolahan

1. Penanganan Bahan Baku

Bahan baku merupakan faktor yang menentukan dalam proses pembuatan makanan dan minuman. Penanganan bahan baku bertujuan untuk memperpanjang daya simpan bahan baku sehingga didapatkan bahan baku yang tersedia untuk proses produksi setiap hari tanpa bergantung pada musim. Penanganan bahan baku juga menjadi salah satu alternatif untuk mengantisipasi hasil panen yang melimpah dari resiko busuk dan harga rendah. Penanganan yang dilakukan meliputi :

- Sortasi : merupakan penanganan lepas panen yang bertujuan untuk memilih bahan yang sesuai dengan standar yang ditentukan perusahaan/konsumen.
- Penghilangan bagian kulit luar (kulit ari) : penghilangan bagian kulit luar (kulit ari) bertujuan untuk mendapatkan kulit bagian dalam bersih, penghilangan kulit ari ada 3 cara yaitu:
 - Kotoran (tanah) dan kulit ari dibersihkan dengan cara dikerok, tanpa dibleng langsung dicuci sampai bersih.
 - Sebelum singkong dikupas, kulit dibersihkan dari tanah dan kulit arinya. Daging kulit dikelokopi lalu dicuci.
 - Jika kulitnya kering, untuk menghilangkan kulit arinya dimasukkan dalam karung selama 1 malam tertutup rapat, keesokan harinya kulit ari rontok sendiri, lalu dicuci.
 - Pengecilan ukuran : pengecilan ukuran bertujuan untuk mempercepat pengeluaran racun HCN dalam kulit singkong, mempercepat perebusan dan penggorengan serta memudahkan pengemasan.
 - Pencucian : pencucian merupakan salah satu penanganan lepas panen yang sangat penting untuk mendapatkan produk yang bebas dari kotoran yang menempel misalnya debu, pasir, tanah, serangga dan kontaminasi kimia. Kulit yang telah diiris, dicuci dengan air mengalir sampai benar-benar bersih. Pencucian dengan air mengalir bertujuan agar kotoran yang menempel pada kulit benar-benar hilang.

2. Perebusan

Bahan baku kulit singkong yang telah bersih dan siap diolah selanjutnya direbus dalam air mendidih selama 45 menit, tujuannya yaitu untuk menghilangkan atau menguraikan racun HCN dalam kulit singkong dan membuat kulit singkong menjadi lunak karena sifat kulit singkong yang liat. Menurut FG. Winarno, dkk penggunaan panas tidak hanya bertujuan untuk membunuh semua mikroba dan menghasilkan bahan yang steril, tetapi panas juga sering

digunakan untuk membunuh mikroba yang menyebabkan penyakit (pathogenik) tetapi perlu diingat bahwa panas tidak merusak citarasa pada bahan makanan.

3. Pencucian Kedua

Perebusan secara otomatis akan mengurai racun HCN. Untuk menghilangkan racun yang belum hilang, kulit hasil rebusan direndam dan dicuci dalam air mengalir dengan debit aliran sedang, selama 1x24 jam dengan catatan dibolak-balik setiap 4 jam. Atau dengan debit air mengalir lebih kecil, perendaman dilakukan selama 3 hari dengan dibolak balik setiap pagi dan sore. Setelah itu kulit ditiriskan.

4. Proses Pembuatan Keripik Paru Nabati

- Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan Keripik Paru Nabati adalah:
- Kulit singkong 1 kg
- Garam halus 1 sdm penuh
- Kemiri 6 butir
- Ketumbar 1,5 sdm
- Bawang putih kating 4 siung
- MSG sepucuk sdt
- Tepung beras ¼ kg
- Tepung tapioka 1 sdm

Proses Pembuatan Keripik Paru Nabati

- Penghancuran/Penghalusan Bumbu : Bumbu keripik berupa bawang, garam, MSG dan rempah-rempah dihaluskan dengan cara ditumbuk. Bumbu halus dimasukkan kedalam panci kemudian dilarutkan dengan air hingga menjadi adonan bumbu.
- Pencampuran Adonan Bumbu dan Tepung : Adonan bumbu yang telah homogen selanjutnya ditambahkan tepung sedikit demi sedikit hingga menjadi adonan tepung yang homogen dengan kekentalan tertentu.
- Pencelupan kulit : Kulit singkong yang telah bersih dan siap diproses, selanjutnya dicelupkan kedalam adonan tepung hingga seluruhnya terbalut tepung.
- Penggorengan : Minyak goreng dipanaskan dalam wajan hingga suhu ± 200 °C, kemudian kulit digoreng sampai setengah matang (± 8 menit) sehingga dihasilkan kulit setengah matang yang teksturnya agak kaku. Kulit yang digoreng setengah matang didiamkan hingga dingin dan dikeringanginkan selama ± 24 jam agar benar-benar layu, tujuannya untuk membuat kulit menjadi agak rapuh.
- Penggorengan II : Penggorengan kedua bertujuan untuk mengeluarkan minyak dan air di udara yang meresap kedalam keripik kulit akibat penggorengan 1 sehingga keripik menjadi renyah. Penggorengan kedua dilakukan dalam minyak panas (± 200 °C) selama ± 3 menit hingga tepung yang semula tidak berwarna berubah menjadi keputihan.
- Penirisan : Keripik yang telah matang diangkat dan ditiriskan kemudian dilakukan penghilangan minyak dengan cara di sentrifugal/dispin. Hal ini bertujuan untuk mengeluarkan minyak hasil penggorengan secara maksimal agar diperoleh keripik yang benar-benar renyah, tiris dan awet.
- Pengemasan : Pengemasan merupakan cara atau perlakuan pengamanan terhadap bahan pangan agar bahan pangan yang belum mengalami pengolahan maupun yang sudah mengalami pengolahan dapat sampai ke tangan konsumen dalam keadaan baik (Hudaya dan Darajat, 1982). Keripik Paru Nabati dikemas dalam plastik berukuran 40 x 65 cm untuk volume 2 kg atau ukuran 18 x 30 cm untuk volume 150 gram.

Produk Akhir

Produk Keripik Paru Nabati diberi label “Kripp Paru Nabati”. Label masih dibuat manual belum dicetak. Setiap hari produksi rata-rata sebanyak 2 kg keripik. Volume produksi masih skala kecil karena bahan baku dalam bentuk kelokopan yang susah didapat dan pemasaran masih dalam tahap pengembangan.

Penyimpanan

Penyimpanan produk dilakukan jika permintaan produk naik drastis sedangkan stok bahan baku terbatas. Dari hasil percobaan penyimpanan produk mulai saat pengemasan hingga beberapa bulan, ternyata Keripik Paru Nabati tahan hingga 4 bulan dengan catatan pada saat penyimpanan menghindari kontak langsung dengan lantai, air dan sinar matahari.

Pemasaran

Menurut Wibowo (1999), pemasaran merupakan salah satu unsur utama untuk mencapai keuntungan usaha. Pada awalnya petani memasarkan produk melalui uji coba orang per orang ternyata masing-masing panelis menyukai produk tersebut. Kemudian petani bekerjasama dengan Penyuluh memasarkan produk lewat Pameran di Soropadan Agro Expo, ternyata respon masyarakat sangat antusias dengan produk tersebut, selanjutnya produk Keripik Paru Nabati oleh Penyuluh diunggah melalui Blog BPP Kecamatan Grabag (www.bppgrabag.blogspot.com) dan mendapat respon untuk diliput dalam tayangan Jejak Si Gundul. Harga jual Keripik Paru Nabati per kg Rp. 50.000,00 atau untuk kemasan 150 gram harga Rp. 10.000,00. Hingga saat ini pemasaran Keripik Paru Nabati mencapai daerah Magelang, Temanggung, Semarang, Solo, Jogja dan Bali.

Percobaan dan Pembahasan

Percobaan yang dilakukan dalam proses pembuatan Keripik Paru Nabati adalah penggunaan jenis/varietas kulit singkong dengan metode pengolahan yaitu perbedaan pemberian bumbu. Jenis kulit singkong yang digunakan adalah jenis rengganis (R1) dan non rengganis (R2), dengan metode pengolahan yang sama yaitu pencelupan kedalam adonan tepung bumbu dan digoreng dengan penggorengan I dan II. Hasil uji coba perlakuan tersebut yaitu :

Tabel 3. Hasil uji coba perbedaan jenis kulit singkong pada proses pembuatan keripik paru nabati

Jenis Kulit Singkong	Warna	Aroma	Rasa	Kerenyahan	Ket
Rengganis (R1)	Coklat ke-hitaman	Khas, terasa aroma ketum-bar	Gurih	Renyah	Tergantung ketebalan kulit
Non Rengganis (R2)	Coklat kurang hitam	Khas, terasa aroma ketum-bar	Gurih	Renyah	Tergantung ketebalan kulit

Dari hasil uji coba diatas dapat diketahui bahwa perbedaan hasil keripik Paru Nabati terletak pada warna keripik. Kulit singkong jenis rengganis menghasilkan warna keripik coklat kehitaman, menyerupai keripik paru sapi sedangkan kulit singkong jenis non rengganis menghasilkan warna keripik coklat kurang hitam. Warna keripik Paru Nabati coklat kehitaman lebih disukai konsumen karena menyerupai keripik paru aslinya sehingga lebih menarik. Namun jika bahan baku kulit singkong jenis rengganis terbatas/tidak mencukupi maka dapat digunakan jenis yang lain (non rengganis) karena aroma, rasa dan kerenyahan yang dihasilkan sama tergantung ketebalan kulit singkong.

Percobaan kedua dilakukan terhadap perbedaan metode pengolahan (perbedaan perlakuan pembumbuan).

Percobaan I

Bahan :

- Kulit singkong 1 kg
- Garam halus 1 sendok makan penuh
- Kemiri 6 butir
- Ketumbar 1,5 sendok makan
- Bawang putih kating 4 siung
- MSG sepuccuk sendok the
- Tepung beras ¼ kg
- Tepung tapioka 1 sendok makan

Cara Pembuatan :

- Penghancuran/Penghalusan bumbu : Bumbu keripik berupa bawang, garam, MSG dan rempah-rempah dihaluskan dengan cara ditumbuk. Bumbu halus dimasukkan kedalam panci kemudian dilarutkan dengan air hingga menjadi adonan bumbu.
- Pencampuran adonan bumbu dan tepung : Adonan bumbu yang telah homogen selanjutnya ditambahkan tepung sedikit demi sedikit hingga menjadi adonan tepung yang homogen dengan kekentalan tertentu.
- Pencelupan kulit singkong kedalam adonan tepung bumbu : Kulit singkong yang telah bersih dan siap diproses, selanjutnya dicelupkan kedalam adonan tepung bumbu hingga seluruhnya terbalut tepung.
- Penggorengan I : Minyak goreng dipanaskan dalam wajan hingga suhu ± 200 °C, kemudian kulit digoreng sampai setengah matang (± 8 menit) sehingga dihasilkan kulit setengah matang yang teksturnya agak kaku. Kulit yang digoreng setengah matang didiamkan hingga dingin dan dikeringanginkan selama ± 24 jam agar benar-benar layu, tujuannya untuk membuat kulit menjadi agak rapuh.
- Penggorengan II : Penggorengan kedua bertujuan untuk mengeluarkan minyak dan air di udara yang meresap kedalam keripik kulit akibat penggorengan 1 sehingga keripik menjadi renyah. Penggorengan kedua dilakukan dalam minyak panas (± 200 °C) selama ± 3 menit hingga tepung yang semula tidak berwarna berubah menjadi keputihan.
- Penirisan : Keripik yang telah matang diangkat dan ditiriskan kemudian dilakukan penghilangan minyak dengan cara di sentrifugal/dispin. Hal ini bertujuan untuk mengeluarkan minyak hasil penggorengan secara maksimal agar diperoleh keripik yang benar-benar renyah, tiris dan awet.

Percobaan II

Bahan :

- Kulit singkong 1 kg
- Garam halus 1 sendok makan penuh
- Kemiri 6 butir
- Ketumbar 1,5 sendok makan
- Bawang putih kating 4 siung
- MSG sepuccuk sendok the
- Tepung beras ¼ kg
- Tepung tapioka 1 sendok makan

Cara Pembuatan :

- Penghancuran/penghalusan bumbu : Bumbu keripik berupa bawang, garam, MSG dan rempah-rempah dihaluskan dengan cara ditumbuk. Bumbu halus dimasukkan kedalam panci kemudian dilarutkan dengan air hingga menjadi adonan bumbu.

- b. Pencelupan kulit singkong kedalam adonan bumbu : Kulit singkong yang telah bersih dicelupkan kedalam adonan bumbu sambil sedikit diremas agar bumbu meresap.
- c. Penggorengan I : Minyak goreng dipanaskan dalam wajan hingga suhu $\pm 200\text{ }^{\circ}\text{C}$, kemudian kulit yang telah dicampur bumbu, digoreng sampai setengah matang (± 8 menit) sehingga dihasilkan kulit setengah matang yang teksturnya agak kaku. Kulit yang digoreng setengah matang didiamkan hingga dingin dan dikeringanginkan selama ± 24 jam agar benar-benar layu.
- d. Pencelupan Kedalam Adonan Tepung : Sisa bumbu yang dilakukan pada proses b, selanjutnya ditambahkan tepung sedikit demi sedikit hingga homogen dengan kekentalan tertentu. Kulit singkong yang telah digoreng setengah matang dicelupkan kedalam adonan tepung bumbu hingga seluruh permukaan tertutupi.
- e. Penggorengan II : Penggorengan kedua bertujuan untuk mengeluarkan minyak dan air di udara yang meresap kedalam keripik kulit singkong akibat penggorengan 1 sehingga keripik menjadi renyah. Penggorengan kedua dilakukan dalam minyak panas ($\pm 200\text{ }^{\circ}\text{C}$) selama ± 3 menit hingga tepung yang semula tidak berwarna berubah menjadi keputihan.
- f. Penirisan : Keripik yang telah matang diangkat dan ditiriskan kemudian dilakukan penghilangan minyak dengan cara di sentrifugal/dispin. Hal ini bertujuan untuk mengeluarkan minyak hasil penggorengan secara maksimal agar diperoleh keripik yang benar-benar renyah, tiris dan awet.

Dari percobaan perbedaan pengolahan keripik (pemberian bumbu) tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4. Hasil uji coba perbedaan metode pengolahan pada proses pembuatan keripik paru nabati

Jenis Kulit Singkong	Warna	Aroma	Rasa	Kerenyahan	Ket
Percobaan I (P1)	Coklat ke-hitaman	Khas, terasa aroma ketum-bar	Gurih	Renyah	Tergantung ketebalan kulit
Percobaan II (P2)	Coklat ke-hitaman	Khas, terasa aroma ketum-bar	Gurih sedikit menyen-gat	Renyah agak liat	Tergantung ketebalan kulit

Berdasarkan hasil uji coba pada Tabel 4 dapat diketahui dengan perbedaan metode pengolahan (pemberian bumbu) pada pembuatan keripik paru nabati menyebabkan perbedaan hasil pada rasa dan kerenyahan. Pada percobaan I (P1) diperoleh hasil keripik dengan warna coklat kehitaman, aroma khas terasa aroma ketumbar dengan rasa gurih dan renyah. Sedangkan percobaan II (P2) diperoleh hasil keripik dengan warna coklat kehitaman, aroma khas terasa ketumbar dengan rasa gurih sedikit menyengat dan renyah agak liat. Kedua percobaan tersebut menggunakan jenis kulit singkong yang sama, yaitu jenis rengganis.

Perbedaan rasa dan kerenyahan pada P1 dan P2 disebabkan karena, pada P2 kulit singkong yang dicelupkan kedalam adonan bumbu tanpa tepung menyebabkan bumbu lebih meresap kedalam kulit sehingga rasa yang dihasilkan lebih tajam. Ketika kulit singkong tersebut dilakukan penggorengan dan dikeringanginkan selama 24 jam maka kulit akan lebih keras akibat pengaruh panas langsung kedalam kulit saat digoreng sehingga kulit menjadi kakau dan air di udara yang diserap saat didiamkan (shock suhu). Oleh karena itu setelah dilakukan penggorengan II hasil keripik

kulit singkong terasa lebih liat. Sedangkan pada P1 saat dilakukan penggorengan I kulit singkong terbalut bumbu yang bercampur tepung sehingga rasa yang dihasilkan tidak menyengat, setelah dilakukan penggorengan I dan didiamkan maka panas dan air tidak bersentuhan langsung dengan kulit singkong, karena kulit singkong terbalut tepung oleh karena itu setelah dilakukan penggorengan II hasil keripik kulit singkong gurih tidak menyengat dan renyah tidak liat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kulit singkong dapat dimanfaatkan menjadi produk yang bernilai ekonomis tinggi yaitu keripik kulit singkong (keripik paru nabati) sebagai bentuk diversifikasi produk berbahan dasar limbah.
2. Respon masyarakat sangat antusias dengan adanya produk ini, terlebih lagi setelah disebarluaskan melalui pameran dan internet.
3. Hasil percobaan menggunakan perbedaan jenis/varietas kulit singkong menghasilkan produk dengan perbedaan warna. Kulit singkong jenis rengganis menjadi pilihan utama.
4. Hasil percobaan menggunakan perbedaan metode pengolahan keripik kulit singkong (Paru Nabati) menghasilkan produk dengan perbedaan rasa dan kerenyahan. Proses pengolahan dengan pencelupan kulit singkong kedalam adonan tepung bumbu sebelum penggorengan I dan II menghasilkan produk yang lebih baik dengan warna, aroma, rasa dan kerenyahan yang lebih disukai konsumen.

Saran dan Rekomendasi

Dari hasil observasi, percobaan, wawancara dan pembahasan yang dilakukan, maka disarankan :

1. Penekanan kepada para buruh di pengrajin slondok puyur agar dapat menggunakan metode pengupasan kelokopan bukan pengerokan kulit sehingga ketersediaan bahan baku dapat diatasi.
2. Kerjasama dengan berbagai pihak agar pemasaran keripik kulit singkong (Paru Nabati) lebih luas sehingga terjadi peningkatan kapasitas produksi.
3. Perbaiki label agar lebih menarik sehingga pemasaran dapat menjangkau supermarket.
4. Pembuatan keripik kulit singkong (Paru Nabati) lebih disarankan menggunakan kulit singkong jenis rengganis dengan metode pencelupan kedalam adonan tepung bumbu sebelum dilakukan penggorengan I dan II agar dihasilkan warna, rasa, aroma dan kerenyahan yang lebih baik.
5. Tingkat keawetan/kadaluarsa Keripik Paru Nabati setelah dilakukan penyimpanan mencapai 4 bulan dengan syarat tidak kontak/bersentuhan langsung dengan lantai, air dan sinar matahari.

DAFTAR PUSTAKA

- Astawan, Made dalam <http://aremaipb.wordpress.com/2010/02/11/tepun-tapioka-manfaatnya/>
- Baedhowie, M. 1983. Petunjuk Praktek Pengawasan Mutu Hasil Pertanian I. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Buckle, K.A, R.A Edwards, G.H Fleet dan M. Wooton. 1985. Ilmu Pangan. Jakarta : Universitas Indonesia Press.

<http://kesehatan.kompasiana.com/makanan/2013/05/03/c/atan-kecil-tentang-minyak-goreng-556676.html>
 Sudarmadji, Bambang Haryono dan Suhardi. 1989. Analisa Bahan Makanan dan Pertanian. Jogjakarta : Liberty.
 Winarno, F.G, Srikandi Fardiaz dan Dedi Fardiaz. 1980. Pengantar Teknologi Pangan. Jakarta : Gramedia.

Winarno, F.G. 1986. Air Dalam Industri Pangan. Cetakan I. Jakarta : Gramedia.
 Winarno, F.G. 2002. Kimia Pangan dan Gizi. Jakarta : Gramedia.

PROSES PENGOLAHAN KERIPIK PARU NABATI



Bahan Baku Kulit Singkong



Pencucian



Perebusan



Pencucian kedua dan Perendaman



Pencelupan Kulit Singkong Kedalam Adonan Tepung Bumbu



Penggorengan



Pengangkatan



Penirisan



Pengemasan



Pemasaran Melalui Pameran

KORELASI ANTARA KELAS KELOMPOK TANI DENGAN PERSEPSI PETERNAK TERHADAP INOVASI FERMENTASI PAKAN HIJAUAN PADA PETERNAK KAMBING KALIGESING DI KECAMATAN KALIGESING KABUPATEN PURWOREJO



Wahyudi

Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo
Jalan Mayjend Sutoyo No. 29 – 30 Purworejo 54114
Telp. (0275) 321404, Fax. (0275) 321015
Email: wahyudi.sabo@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Kelompok tani berdasarkan kemampuan kelompok diklasifikasikan menjadi empat kelas yaitu kelas pemula, kelas lanjut, kelas madya, dan kelas utama. Pengklasifikasian kelas kelompok tani mencerminkan tingkat kemampuan setiap kelompok tani. Penelitian yang telah dilakukan bertujuan untuk mengetahui persepsi peternak Kambing Kaligesing terhadap inovasi fermentasi pakan hijauan pada masing-masing kelas kelompok tani, dan untuk mengetahui korelasi antara kelas kelompok tani dengan persepsi peternak Kambing Kaligesing terhadap inovasi fermentasi pakan hijauan. Lokasi penelitian di Kecamatan Kaligesing sebagai sentra peternakan Kambing Kaligesing. Responden penelitian adalah peternak Kambing Kaligesing di Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo yang diambil secara purposive sampling yaitu peternak anggota kelompok yang pernah praktek membuat fermentasi pakan hijauan. Penelitian dilakukan dengan metode survei kuesioner (questionnaire survey). Jumlah responden penelitian sebanyak 46 peternak pada tiga kelas kelompok tani yaitu kelas pemula, lanjut, dan

madya. Korelasi antara kelas kelompok tani dengan persepsi peternak terhadap karakteristik inovasi yang terdiri dari keuntungan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, triabilitas, dan observabilitas fermentasi pakan hijauan dianalisis dengan uji Rank Spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peternak pada kelompok kelas pemula, kelas lanjut, dan kelas madya memiliki persepsi sedang dan tinggi, artinya peternak memiliki persepsi yang positif terhadap inovasi fermentasi pakan. Hasil uji Rank Spearman nilai koefisien korelasi antara kelas kelompok dengan persepsi peternak yaitu 0,621 dengan nilai signifikansi 0,000 yang artinya terdapat hubungan sangat nyata ($P < 0,01$) antara kelas kelompok tani dengan persepsi peternak terhadap inovasi teknologi fermentasi pakan hijauan. Koefisien korelasi bernilai positif artinya semakin tinggi kelas kelompok maka akan semakin positif persepsi peternak terhadap inovasi fermentasi pakan hijauan.

Kata kunci: kelas kelompok, persepsi, peternakan, fermentasi pakan

PENDAHULUAN

Kelompok tani memiliki fungsi sebagai kelas belajar, wahana untuk kerjasama dan sebagai unit produksi bagi para petani maupun peternak. Selain itu keefektifan dan efisiensi pelaksanaan penyuluhan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kelompok tani. Hal ini menyebabkan keberadaan kelompok tani menjadi semakin penting. Kelompok tani di Kecamatan Kaligesing pada tahun 2013 sebanyak 132 kelompok yang terdiri dari kelas pemula 72 kelompok, kelas lanjut 44 kelompok, dan kelas madya 16 kelompok.

Setiap kelompok tani memiliki kemampuan dan dinamika kelompok yang berbeda-beda. Kelompok tani menurut Peraturan Menteri Pertanian No.82/Permentan/OT.140/8/2013 berdasar kemampuan kelompok diklasifikasikan menjadi empat kategori yaitu kelas pemula, kelas lanjut, kelas madya, dan kelas utama. Adanya pengklasifikasian kelas kelompok tani akan dapat mencerminkan tingkat kemampuan setiap kelompok tani. Diharapkan suatu kelompok tani dari waktu ke waktu akan semakin meningkat kelas kelompoknya.

Peningkatan kelas kelompok dari suatu kelompok tani juga tidak terlepas dari peningkatan kemampuan para anggota kelompoknya. Anggota kelompok tani pada setiap tingkat kelas kelompok juga akan memiliki sikap berbeda terhadap suatu inovasi teknologi. Teknologi fermentasi pakan hijauan sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi kendala pakan bagi para peternak juga akan mendapat tanggapan dan persepsi yang berbeda dari masing-masing peternak. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan 1) Bagaimana persepsi peternak Kambing Kaligesing terhadap inovasi fermentasi pakan hijauan pada masing-masing kelas kelompok tani?; 2) Bagaimana korelasi antara kelas kelompok tani dengan persepsi peternak Kambing Kaligesing terhadap inovasi fermentasi pakan hijauan?

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui persepsi peternak Kambing Kaligesing terhadap inovasi fermentasi pakan hijauan pada masing-masing kelas kelompok tani; 2) Mengetahui korelasi antara kelas kelompok tani dengan persepsi peternak Kambing Kaligesing terhadap inovasi fermentasi pakan hijauan. Oleh karena itu penelitian ini bermanfaat bagi 1) Penyuluh: dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pada masing-masing kelas kelompok tani; 2) Penentu kebijakan: dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan kebijakan terhadap masing-masing kelas kelompok tani; 3) Ilmu pengetahuan: dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan kelas kelompok tani.

TINJAUAN PUSTAKA

Kelas Kelompok Tani

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani menyebutkan bahwa kelompok tani (poktan) adalah kumpulan petani, peternak, pekebun, yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Menurut Mardikanto (2003) kelompok tani adalah sekumpulan orang-orang tani atau petani yang terdiri dari petani dewasa (pria/wanita) maupun petani taruna yang terikat secara informal dalam suatu wilayah kelompok atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta berada di lingkungan pengaruh dan dipimpin oleh seorang kontak tani.

Upaya meningkatkan daya saing petani salah satunya adalah pengembangan kelembagaan pertanian, pemberdayaan, pemantapan, dan peningkatan kemampuan kelompok-kelompok petani kecil (Kartasasmita, 1997). Peraturan Menteri Pertanian Nomor

82/Permentan/OT.140/8/2013 juga menyebutkan pengklasifikasi kemampuan kelompok tani yang merupakan pemeringkatan kemampuan kelompok tani ke dalam empat kategori yang terdiri dari kelas pemula, kelas lanjut, kelas madya, dan kelas utama yang penilaiannya berdasarkan kemampuan kelompok tani.

Pelaksanaan penilaian kemampuan kelompok tani sesuai dengan surat keputusan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian nomor 168/Per/SM.170/J/11/11 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kemampuan Kelompok Tani. Klasifikasi kemampuan kelompok tani ditentukan berdasarkan skor nilai hasil penilaian yaitu kelas pemula dengan nilai 0 – 250, kelas lanjut dengan nilai 251 – 500, kelas madya dengan nilai 501 – 750, dan kelas utama dengan nilai 751 – 1000. Sertifikat pengukuhan kelas kelompok untuk kelas pemula ditandatangani oleh kepala desa/lurah, kelas lanjut ditandatangani oleh camat sedangkan kelas madya dan kelas utama ditandatangani oleh bupati/walikota.

Persepsi

Van den Ban dan Hawkins (1999) mengemukakan persepsi adalah proses menerima informasi atau stimuli dari lingkungan dan mengubahnya ke dalam kesadaran psikologis. Kotler (2000) menyatakan persepsi sebagai proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti.

Menurut Walgito (2003) persepsi seseorang merupakan proses aktif yang memegang peranan, bukan hanya stimulus yang mengenyainya tetapi juga individu sebagai satu kesatuan dengan pengalaman-pengalamannya, motivasi serta sikapnya yang relevan dalam menanggapi stimulus. Robbins (2003) mendeskripsikan persepsi dalam kaitannya dengan lingkungan yaitu sebagai proses di mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Persepsi yang baik dan motivasi kerja yang tinggi maka akan semakin meningkatkan tingkat kesejahteraan peternak (Sumantri dan Purwoko, 2007).

Rakhmat (2003) menyatakan bahwa persepsi interpersonal adalah memberikan makna terhadap stimuli inderawi yang berasal dari seseorang (komunikatif), yang berupa pesan verbal dan nonverbal. Peternak memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap peran penyuluh sesuai dengan yang mereka terima dan rasakan, hal ini karena menurut Desiderato (1976) menyatakan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

Karakteristik Inovasi

Menurut Robbins (1994) inovasi adalah suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memrakarsai atau memperbaiki suatu produk atau proses dan jasa. Rogers (1983) mengatakan inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek atau objek/benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi.

Tiga hal utama inovasi menurut Robbins (1994) adalah 1) Gagasan baru, yaitu suatu olah pikir dalam mengamati suatu fenomena yang sedang terjadi; 2) Produk dan jasa, yaitu langkah lanjutan dari adanya gagasan baru yang ditindaklanjuti dengan berbagai aktivitas, kajian, penelitian, dan percobaan sehingga melahirkan konsep yang lebih konkret dalam bentuk produk dan jasa yang siap dikembangkan dan diimplementasikan; 3) Upaya perbaikan, yaitu usaha sistematis untuk melakukan penyempurnaan dan melakukan perbaikan yang terus-menerus sehingga buah inovasi dapat dirasakan manfaatnya.

Rogers (1983) mengemukakan ada 5 karakteristik inovasi yaitu keuntungan relatif (relative advantage), kompatibilitas (compability), kompleksitas (complexity), kemampuan diujicoba (triability) dan kemampuan untuk diamati (observability).

a. Keuntungan relatif (relative advantage)

Keuntungan relatif mencerminkan sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Tingkat keuntungan atau kemanfaatan suatu inovasi dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya, atau dari faktor status sosial, kesenangan, kepuasan, atau karena mempunyai komponen yang sangat penting. Semakin menguntungkan bagi penerima maka semakin cepat inovasi tersebar.

b. Kompatibilitas (compability)

Kompatibel merupakan tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan penerima. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada di masyarakat.

c. Kompleksitas (complexity)

Kompleksitas menunjukkan tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Suatu inovasi yang mudah dimengerti dan mudah digunakan oleh penerima akan cepat tersebar, sedangkan inovasi yang sulit dimengerti atau sulit digunakan oleh penerima akan lambat proses penerimaannya.

d. Kemampuan diujicoba (triability)

Triabilitas menunjukkan dapat atau tidaknya suatu inovasi untuk dicoba oleh penerima. Suatu inovasi yang dapat dicoba akan lebih cepat diterima oleh masyarakat dari pada inovasi yang tidak dapat dicoba lebih dahulu.

e. Kemampuan untuk diamati (observability).

Kemampuan untuk diamati maksudnya mudah atau tidaknya pengamatan suatu hasil inovasi. Suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan makin cepat diterima oleh masyarakat, dan sebaliknya bila sukar diamati hasilnya maka akan lama diterima oleh masyarakat.

Fermentasi Pakan Hijauan

Menurut Desrosier (1987) fermentasi adalah suatu oksidasi karbohidrat anaerob dan aerob sebagian dan merupakan suatu kegiatan penguraian bahan-bahan karbohidrat. McWhirter (1987) mengemukakan fermentasi adalah proses untuk menghasilkan berbagai produk dengan perantara atau dengan melibatkan mikrobia. Fermentasi merupakan proses perombakan dari struktur keras secara fisik, kimia, dan biologis sehingga bahan dari struktur kompleks menjadi sederhana sehingga daya cerna ternak menjadi lebih efisien (Hanafi, 2008).

Tujuan perlakuan fermentasi adalah meningkatkan manfaat pakan berserat (Van Soest, 1994). Manfaat fermentasi diharapkan terjadi depolimerasi selulosa yang merupakan komponen serat utama, oleh berbagai enzim selulase mikrobia. Depolimerisasi adalah proses memisahkan senyawa makromolekuler dengan berbagai cara menjadi senyawa yang relatif lebih sederhana. Depolimerisasi mengakibatkan perubahan sebagian selulosa menjadi senyawa yang lebih sederhana sehingga fermentasi dalam rumen lebih cepat, dengan demikian meningkatkan utilitas dan konsumsi pakan (Widiyanto, 1996).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, selama tiga bulan dari Februari sampai April 2014. Responden penelitian adalah peternak Kambing Kaligesing di Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah diambil secara purposive sampling yaitu peternak anggota kelompok yang pernah praktek membuat pakan fermentasi hijauan. Total responden penelitian sebanyak 46 peternak yang berasal dari kelompok tani kelas pemula, kelas lanjut, dan kelas madya. Kuesioner terdiri dari data karakteristik peternak dan 15 butir pernyataan untuk mengukur persepsi peternak terhadap karakteristik inovasi (keuntungan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, triabilitas, dan observabilitas).

Uji validitas dan uji reliabilitas dilakukan terhadap kuesioner sebelum digunakan untuk penelitian. Metode penelitian menggunakan metode survei kuesioner (questionnaire survey) yaitu dengan cara responden mengisi kuesioner sendiri secara pribadi.

Analisis Data

Kuesioner yang digunakan untuk mengukur persepsi peternak terhadap inovasi fermentasi pakan hijauan dalam bentuk pernyataan tertutup. Pernyataan berjumlah 15 butir pernyataan dengan menggunakan skala Likert yaitu sangat setuju (SS) dengan skor nilai 5, setuju (S) dengan skor nilai 4, ragu-ragu (RG) dengan skor nilai 3, tidak setuju (TS) dengan skor nilai 2 dan sangat tidak setuju (STS) dengan skor nilai 1. Skor tertinggi 5 dan skor terendah 1.

Persepsi peternak terhadap inovasi fermentasi diklasifikasikan berdasarkan distribusi frekuensi (Sudjana, 1989) sebagai berikut.

$$\text{Panjang kelas interval} = \frac{\text{Skor tertinggi} - \text{Skor terendah}}{\text{Jumlah interval kelas}}$$

Berdasar rumus tersebut maka persepsi peternak dikategorikan menjadi persepsi rendah dengan skor nilai 15 sampai dengan 35, persepsi sedang dengan skor nilai lebih dari 35 sampai dengan 55 dan persepsi tinggi dengan skor nilai lebih dari 55 sampai dengan 75.

Korelasi antara kelas kelompok tani dengan persepsi peternak terhadap inovasi fermentasi pakan hijauan dianalisis dengan analisis Rank Spearman dengan rumus sebagai berikut.

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

Keterangan:
 r_s = Koefisien korelasi Spearman
 n = Jumlah pasangan rank
 D = Selisih perbedaan rank

Analisis data menggunakan program aplikasi komputer SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 16.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelas Kelompok tani

Responden penelitian sebanyak 46 peternak berasal dari tiga kelas kelompok tani yaitu kelas pemula, lanjut, dan madya (Tabel 1).

Tabel 1. Kelas kelompok tani

Nama Kelompok	Desa	Tahun Berdiri	Kelas Kelompok	Responden (orang)
Margo Mulyo	Donorejo	2003	Lanjut	15
Subur 3 Barokah	Ngaran	2010	Madya	5
Gajah Mungkur	Kaliharjo	2003	Lanjut	9
Mekar Abadi	Tlogobulu	2008	Pemula	7
Sido Maju 1	Pandanrejo	1985	Madya	10
Jumlah				46

Berdasar Tabel 1 diketahui bahwa tingkat kelas kelompok tani tidak selalu searah dengan tahun berdiri, semakin lama usia kelompok tidak selalu membuat tingkat kelas kelompok semakin tinggi. Hal tersebut terbukti dengan kelompok Subur 3 Barokah yang berdiri tahun 2010 sudah mencapai kelas madya sedangkan kelompok lain yang berdiri sebelum tahun 2010 masih kategori kelas pemula dan kelas lanjut. Kelas kelompok lebih ditentukan oleh dinamika kelompok yang dapat diukur saat pelaksanaan penilaian kemampuan kelompok dengan menggunakan instrumen penilaian kemampuan kelompok. Hal ini sesuai dengan Syam et al., (2000) bahwa usia kelompok ternyata tidak menjamin kinerja kelompok.

Persepsi Peternak terhadap Inovasi Fermentasi Pakan Hijauan

Persepsi peternak terhadap inovasi fermentasi pakan hijauan merupakan persepsi peternak terhadap karakteristik inovasi yang meliputi keuntungan relatif (relative advantage), kompatibilitas (compatibility), kompleksitas (complexity), kemampuan diujicoba (triability), dan kemampuan untuk diamati (observability).

a. Keuntungan relatif (relative advantage)

Jumlah pernyataan untuk mengukur persepsi peternak terhadap aspek keuntungan relatif inovasi fermentasi pakan hijauan sebanyak tiga pernyataan. Persepsi peternak terhadap aspek keuntungan relatif inovasi fermentasi pakan hijauan tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Persepsi peternak terhadap aspek keuntungan relatif inovasi fermentasi pakan hijauan

Kelas Kelompok	Persepsi					
	Rendah (3-7)		Sedang (>7-11)		Tinggi (>11-15)	
	Orang	%	Orang	%	Orang	%
Madya	2	13,33	2	13,33	11	73,34
Lanjut	0	0	2	8,33	22	91,67
Pemula	6	85,71	1	14,29	0	0

Berdasar Tabel 2 diketahui bahwa persepsi peternak terhadap aspek keuntungan relatif inovasi fermentasi pakan hijauan pada kelompok tani kelas madya dan kelas lanjut terjadi peningkatan persentase dari persepsi rendah ke tinggi, akan tetapi hal tersebut tidak terjadi pada kelompok tani kelas pemula.

b. Kompatibilitas (compatibility)

Persepsi peternak terhadap aspek kompatibilitas inovasi fermentasi pakan hijauan tercantum pada Tabel 3. Persepsi peternak terhadap aspek kompatibilitas inovasi fermentasi pakan hijauan pada kelas madya dan lanjut persentasenya meningkat dari persepsi sedang ke persepsi tinggi, sedangkan pada kelompok kelas pemula seluruhnya memiliki persepsi sedang.

Tabel 3. Persepsi peternak terhadap aspek kompatibilitas inovasi fermentasi pakan hijauan

Kelas Kelompok	Persepsi					
	Rendah (3-7)		Sedang (>7-11)		Tinggi (>11-15)	
	Orang	%	Orang	%	Orang	%
Madya	0	0	3	20,00	12	80,00
Lanjut	0	0	3	12,50	21	87,50
Pemula	0	0	7	100,00	0	0

c. Kompleksitas (complexity)

Persepsi peternak terhadap aspek kompleksitas inovasi fermentasi pakan hijauan tercantum pada Tabel 4. Persepsi peternak terhadap aspek kompleksitas inovasi fermentasi pakan hijauan terjadi peningkatan persentase sesuai peningkatan persepsi pada kelompok kelas madya dan kelas lanjut.

Tabel 4. Persepsi peternak terhadap aspek kompleksitas inovasi fermentasi pakan hijauan

Kelas Kelompok	Persepsi					
	Rendah (3-7)		Sedang (>7-11)		Tinggi (>11-15)	
	Orang	%	Orang	%	Orang	%
Madya	0	0	3	20,00	12	80,00
Lanjut	0	0	3	12,50	21	87,50
Pemula	0	0	7	100,00	0	0

d. Kemampuan diujicoba (triability)

Persepsi peternak terhadap aspek triabilitas inovasi fermentasi pakan hijauan tercantum pada Tabel 5. Persepsi peternak terhadap aspek triabilitas inovasi fermentasi pakan hijauan pada kelompok kelas madya dan kelas lanjut semakin meningkat jumlah persentasenya searah dengan peningkatan persepsi.

Tabel 5. Persepsi peternak terhadap aspek triabilitas inovasi fermentasi pakan hijauan

Kelas Kelompok	Persepsi					
	Rendah (3-7)		Sedang (>7-11)		Tinggi (>11-15)	
	Orang	%	Orang	%	Orang	%
Madya	0	0	1	6,67	14	93,33
Lanjut	0	0	3	12,50	21	87,50
Pemula	0	0	7	100,00	0	0

e. Kemampuan untuk diamati (observability).

Persepsi peternak terhadap aspek observabilitas inovasi fermentasi pakan hijauan tercantum pada Tabel 6. Persepsi peternak terhadap aspek observabilitas inovasi fermentasi pakan hijauan semakin meningkat persentasenya sesuai peningkatan persepsi pada kelompok kelas lanjut dan kelas madya.

Tabel 6. Persepsi peternak terhadap aspek observabilitas inovasi fermentasi pakan hijauan

Kelas Kelompok	Persepsi					
	Rendah (3-7)		Sedang (>7-11)		Tinggi (>11-15)	
	Orang	%	Orang	%	Orang	%
Madya	1	6,67	2	13,33	12	80,00
Lanjut	0	0	9	37,50	15	62,50
Pemula	7	100,00	0	0	0	0

Persepsi peternak terhadap karakteristik inovasi fermentasi pakan hijauan yang terdiri dari aspek keuntungan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, triabilitas, dan observabilitas tercantum pada Tabel 7.

Tabel 7. Persepsi peternak terhadap inovasi fermentasi pakan hijauan

Kelas Kelompok	Persepsi					
	Rendah (3-7)		Sedang (>7-11)		Tinggi (>11-15)	
	Orang	%	Orang	%	Orang	%
Madya	0	0	2	13,33	13	86,67
Lanjut	0	0	0	0	24	100,00
Pemula	0	0	7	100,00	0	0

Berdasar Tabel 7 dapat diketahui bahwa persepsi peternak terhadap inovasi fermentasi pakan hijauan pada kelompok kelas pemula sebanyak 100% memiliki persepsi sedang dan pada kelas lanjut 100% memiliki persepsi tinggi, sedangkan pada kelompok kelas madya sebanyak 13,33% memiliki persepsi sedang dan 86,67% memiliki persepsi tinggi.

Korelasi antara Kelas Kelompok tani dengan Persepsi Peternak terhadap Inovasi Fermentasi Pakan Hijauan

Uji Rank Spearman dilakukan untuk mengetahui korelasi antara kelas kelompok dengan persepsi peternak terhadap inovasi fermentasi pakan hijauan. Hasil uji Rank Spearman memperoleh nilai koefisien korelasi antara kelas kelompok dengan persepsi peternak 0,621 dengan nilai signifikansi 0,000 yang artinya terdapat hubungan sangat nyata ($P < 0,01$) antara kelas kelompok tani dengan persepsi peternak terhadap inovasi teknologi fermentasi pakan hijauan. Koefisien korelasi bernilai positif artinya semakin

tinggi kelas kelompok maka akan semakin tinggi pula persepsi peternak terhadap inovasi fermentasi pakan hijauan.

Hasil ini sesuai dengan Wahyudi (2013) yang menyatakan bahwa kelas kelompok memiliki korelasi positif dengan tingkat persepsi peternak terhadap peran penyuluh. Munyuli (2011) menyatakan bahwa pertemuan petani dengan penyuluh secara rutin yang pada umumnya dilakukan melalui kelompok tani memiliki korelasi sangat nyata dengan tingkat persepsi peternak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasar hasil analisis data disimpulkan:

1. Peternak Kambing Kaligesing pada kelas pemula, lanjut, dan madya memiliki tingkat persepsi positif terhadap inovasi fermentasi pakan hijauan;
2. Kelas kelompok pemula, lanjut, dan madya berkorelasi positif dengan persepsi peternak terhadap inovasi fermentasi pakan hijauan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan:

1. Faktor pengalaman beternak perlu mendapat perhatian khusus terutama dalam pengenalan inovasi teknologi karena memiliki korelasi yang erat dengan tingkat persepsi peternak;
2. Para peternak yang memiliki pengalaman beternak lebih lama dapat dipilih untuk dijadikan nara sumber di lokasi percontohan bagi peternak lainnya dalam proses pengenalan inovasi teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Desiderato, O. 1976. Investigating Behavior: Principle of Psychology. Haper and Row Publisher. New York
- Desrosier, N.W. 1987. Teknologi Pengawetan Pangan. UI Press. Jakarta
- Djarwanto. 2001. Statistik Nonparametrik Edisi 3. BPFE. Yogyakarta
- Hanafi, N.D. 2008. Teknologi Pengawetan Pakan Ternak. Departemen Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Kartasasmita, G. 1997. Meningkatkan Daya Saing Pertanian dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Nasional. Prosiding Konferensi Nasional XII PERHEPI. CV Tiga Serangkai. Jakarta
- Kotler, P. 2000. Marketing Manajemen: Analysis, Planning, Implementation, and Control 9th Edition. Prentice Hall International. New Jersey
- Mardikanto, T. 2003. Penyuluhan Pembangunan Pertanian. UNS Press. Surakarta.
- Mc Whirter, N. 1987. The Macmillan Encyclopedia. 3th ed. Guild Publishing. London
- Munyuli, T. 2011. Farmer's perceptions of pollinators' importance in coffee production in Uganda. J. Agr. Sci. 2(3): 318-333.
- Rakhmat, J. 2003. Psikologi Komunikasi. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Robbins, S. P. 1994. Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi. Alih Bahasa Jusuf Udaya. Arcan. Jakarta
- Robbins, S.P. 2003. Perilaku Organisasi. Jilid I. PT Indeks Kelompok Garmedia. Jakarta
- Rogers, E.M. 1983. Diffusion of Innovation. The Free Press, A Division of Macmillan Publishing. New York
- Sudjana. 1989. Metode Statistik. Edisi Keempat. Tarsito. Bandung
- Sumantri, B. dan A. Purwoko. 2007. Faktor-faktor penentu tingkat adopsi teknologi pemeliharaan sapi di PT. Agrical Kabupaten Bengkulu Utara. J. Ilmu-ilmu Pertanian Indonesia Edisi Khusus No.1 2007: 78-85.
- Syam, A., M. Syukur, N. Ilham dan Sumedi. 2000. Baseline survai program pemberdayaan petani untuk mencapai ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor
- Van-den-Ban, A.W. dan H.S. Hawkins, 1999. Penyuluhan Pertanian. Penerbit Kanisius. Yogyakarta
- Van Soest, P. J. 1994. Nutritional Ecology Of The Ruminant, Ruminant Metabolism, Nutritional Strategies. The Cellulolytic Fermentation and The Chemistry Of Forages and Plants Fibers, 2nd. O and Books. Inc. Corvalles. Oregon
- Wahyudi. 2013. Hubungan antara Karakteristik Peternak Kambing Kaligesing dengan Persepsi Peternak terhadap Peran Penyuluh dalam Manajemen Pemeliharaan di Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo. Tesis. Fakultas Peternakan UGM. Yogyakarta.
- Walgito, B. 2003. Pengantar Psikologi Umum. Andi Offset. Yogyakarta
- Widiyanto .1996. Teknologi Amofer Untuk Meningkatkan Daya Guna Limbah Berserat Sebagai Pakan Ternak Ruminansia. Buletin Sintesis. Yayasan Dharma Agrika. Semarang. 7(5):7-13.



MEMBANGUN KELEMBAGAAN PETANI YANG “*BANKABLE*”, DALAM Mendukung PROGRAM SWASEMBADA DAGING



Sutiyo Purwono

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
Kabupaten Boyolali
sutyopurwono@gmail.com

Abstrak

Pembinaan kelembagaan petani dilaksanakan dengan pendekatan kelompok sehingga dapat untuk meningkatkan dan efisiensi penyelenggaraan penyuluhan. Selain itu pendekatan kelompok juga diarahkan sebagai langkah mendorong kelompok tani, gabungan kelompok tani tumbuh dan berkembang menjadi kelembagaan petani yang mampu menerapkan sistem agribisnis dalam usahatani. Dengan demikian mampu menjalankan fungsinya dan meningkatkan kapasitasnya melalui pengembangan kerja sama dalam bentuk jejaring dan kemitraan. Kondisi yang berkembang saat ini masih banyak dijumpai kelembagaan petani yang belum memiliki kekuatan hukum sehingga posisi tawarnya rendah. Hal ini menyebabkan belum

optimalnya pelaksanaan kemitraan usahatani. Bagi kelompok tani yang berhasil dalam mengembangkan usahanya dapat ditingkatkan kemampuan dan kapasitasnya menjadi kelembagaan petani yang bankable. Asosiasi Peternak Sapi Boyolali (ASPIN) dibentuk sebagai wadah berkiprahnya kelompok tani ternak untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pada akhirnya akan menjadi kelembagaan petani yang bankable dan mampu mendukung program swasembada daging.

Kata kunci : Kelembagaan, Petani, bankable, swasembada

PENDAHULUAN

Kelompoktani merupakan kelembagaan di tingkat petani yang dibentuk untuk secara langsung mengorganisir para petani dalam berusahatani. Kelompoktani didefinisikan sebagai kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Kelembagaan petani tersebut dibentuk oleh dan untuk petani, guna mengatasi masalah bersama dalam usahatani serta menguatkan posisi tawar petani, baik dalam pasar sarana maupun pasar produk pertanian (Anonim, 2013).

Berdasarkan Keputusan Bupati Boyolali Nomor 520/96 Tahun 2012 tentang Pengukuhan Kelompok tani, Gabungan Kelompok tani, Kelompok Wanita tani dan Kelompok tani Pemuda tercatat sebanyak 2.048 kelompok yang tersebar di 267 desa/kelurahan, 264 Gapoktan, 217 kelompoktani Wanita dan 63 kelompoktani Pemuda. Peningkatan jumlah kelompok tani tersebut tidak diikuti dengan peningkatan kualitas sehingga masih banyak kelompok tani belum mampu mandiri atau masih tetap ditentukan dari atas dalam berbagai hal, seperti dalam menentukan jenis komoditas yang diusahakan, menentukan pasar, menentukan mitra usaha, menentukan harga komoditas dan sebagainya. Akibatnya kualitas kelompok tani yang dibentuk kurang dapat berperan sebagai aset komunitas masyarakat desa yang partisipatif.

Sebagian besar kelompoktani dari tahun ke tahun dapat dikatakan belum mengalami perkembangan yang signifikan. Secara empiris gambaran kelompok tani tersebut sebagai berikut : (a) sebagian besar kelas kelompoktani yang ada masih pemula, (b) sebagian kelompok tani sudah tidak aktif tetapi masih terdaftar, (c) belum ada penilaian kemampuan kelas kelompok secara periodik. Rendahnya kinerja kelompok tani yang ada antara lain disebabkan rendahnya peran pengurus kelompok tani, anggota kelompok tani tidak jelas, struktur organisasi tidak lengkap dan tidak berfungsi, rendahnya produktivitas usahatani dan kurangnya pembinaan dari aparat penyuluh. Selain itu, pembentukan kelembagaan tersebut tidak dilakukan secara partisipatif sehingga tidak dapat mengakomodasi potensi dan kepentingan petani yang seharusnya menjadi modal untuk melakukan aksi kolektifnya. Bahkan kelompok tani yang dibentuk sering hanya bersifat temporer (dadakan) yang aktif pada saat-saat tertentu, seperti ketika ada pendistribusian bantuan pupuk bersubsidi, kredit bersubsidi atau bentuk bantuan-bantuan lainnya (Hermanto et al., 2010).

Pembentukan dan penumbuhan kelompoktani mestinya ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, yaitu konteks pengembangan ekonomi dan kemandirian masyarakat menuju pembangunan yang berkelanjutan. Keberadaan kelompok tani hanyalah alat dan merupakan salah satu opsi kelembagaan yang dapat dipilih, bukan tujuan dan bukan keharusan. Oleh karena itu, penggunaan kelompok tani yang semata-mata hanya untuk mensukseskan kegiatan lain dan bukan untuk pengembangan kelompoktani itu sendiri sebagaimana selama ini. Akibat kondisi tersebut menyebabkan fungsi kelompoktani hanya semu dan tidak akan pernah eksis secara riil.

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran dan fungsi kelembagaan petani berdasarkan pengalaman penulis menumbuhkan kelompoktani menjadi asosiasi. Tulisan ini juga akan menggambarkan potensi, kendala dan langkah-langkah strategis menumbuhkan kelembagaan petani yang bankable dalam mendukung program swasembada daging.

Kiprah Asosiasi Peternak Sapi Boyolali (aspin)

Berawal dari beberapa kelompoktani ternak yang dipelopori kelompoktani ternak Plasma Mulia Dukuh Pilanghari Desa Potronayan Kecamatan Nogosari menggelar pertemuan yang dikemas dalam topik "Sarasehan dan Pembinaan Kelompok Peternakan" pada tanggal 3 Desember 2012 lalu. Pada forum tersebut dihadiri Penyuluh Pertanian Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) Boyolali, Penyuluh Pertanian BP3K Nogosari, Dinas Peternakan dan Perikanan Boyolali, LPPM UNS, Bank Indonesia (BI) Wilayah Surakarta dan Bank Jateng Cabang Boyolali. Tujuan pertemuan tersebut sebagai langkah penguatan kelembagaan petani, media komunikasi guna mendapatkan informasi dan pembinaan dari Dinas terkait. Termasuk upaya mengakses sumber pendanaan dari program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) dan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS). Hasil forum tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap kelompoktani pada prinsipnya dapat mengakses skim kredit yang telah disediakan pihak perbankan sesuai ketentuan dan syarat yang berlaku untuk mengembangkan dan menambah modal kerja.

Kelompok tani ternak Plasma Mulia yang berusaha dalam bidang penggemukan sapi potong dipercaya dapat mengakses permodalan sehingga setelah pertemuan tersebut berupaya menata organisasi kelompok sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 82/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani.





Dalam Permentan tersebut disebutkan bahwa kelompok tani (Poktan) adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Dalam perkembangan selanjutnya Poktan-Poktan yang ada dalam satu wilayah pedesaan dapat membentuk gabungan kelompok tani (Gapoktan).

Poktan dan atau Gapoktan yang mengusahakan komoditas sama berfungsi sebagai media komunikasi untuk memperjuangkan kepentingan anggotanya dalam mengakses sarana produksi dan teknologi, advokasi dan membantu penyelesaian dalam usahatani, dapat membentuk Asosiasi sesuai dengan komoditas yang diusahakan. Tidak mengherankan jika keberadaan asosiasi yang berkembang di Kabupaten Boyolali sebagai wahana berkiprah para anggotanya untuk meningkatkan usahatannya dengan mengembangkan sikap saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan saling menguntungkan. Sehingga asosiasi yang terbentuk makin terikat dalam kepentingan dan tujuan bersama dalam meningkatkan produksi dan pendapatan dari usahatannya. Dengan demikian akses permodalan yang menjadi kendala bagi sebagian besar kelompok tani yang ada kini dan disediakan pihak perbankan dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Menurut pengelola Bogor Agro Lestari (BAL), Sujatmoko Toni, agar petani bisa mengakses skim kredit tersebut diperlukan pendampingan. Dengan cara ini pihak BAL dapat mengakses modal kredit untuk peternak dari perbankan mencapai nilai Rp 9,35 miliar. Angka tersebut diperoleh selama pendampingan dua tahun (2009-2010) yang membina 9 kelompok ternak dengan jumlah populasi ternak sapi potong dan perah mencapai 1.000 ekor. Jumlah tersebut diperoleh modal dari skim KUR bank Mandiri dan skim KKPE bank BRI. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Perbedayaan Petani pada pasal 69 ayat (1), pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani. Bentuk kelembagaan petani yang dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) adalah Asosiasi. Berdasar kesepakatan para anggota, akhirnya Kelompok

Plasma Mulia beserta 23 anggota kelompok tani ternak sapi lainnya membentuk Asosiasi Peternak Sapi Boyolali (ASPIN) berdasar Akta Notaris Indah Antari Murti, SH., MKn. Nomor 31 tanggal 30 Januari 2013. Keberadaan ASPIN mengemban amanah untuk berkontribusi terhadap program pemerintah dalam berswasembada daging. Sejak saat itulah kiprah ASPIN yang membawa Visi mewujudkan masyarakat peternak sapi Boyolali yang berswasembada dan lebih sejahtera pada tahun 2018, dengan jumlah sapi yang dipelihara saat itu mencapai 1.963 ekor.

Tujuan dibentuknya ASPIN :

1. Mengembangkan kualitas kehidupan anggota dan kemajuan lingkungan kerja secara umum dengan cara peningkatan pendapatan ekonomi, kualitas kesejahteraan dan kemandirian dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, maju, mandiri, sejahtera dan berkepribadian.
2. Mendorong dan menumbuhkan usaha-usaha produktif anggota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
3. Mengusahakan menyediakan dan mengembangkan sumber-sumber modal bagi para anggota untuk melaksanakan kegiatan usaha produktif dengan tidak memberatkan anggota.
4. Mengembangkan sikap hemat, tidak konsumtif, pola hidup terencana dan orientasi pada setiap anggota.
5. Terbentuknya sebuah wadah resmi bagi peternak sapi dan kelompok peternak di tingkat Kabupaten Boyolali sebagai partner pemerintah dan stakeholder dalam memajukan peternakan sapi.

Misi ASPIN antara lain :

1. Mewadahi para peternak sapi untuk saling bertukar informasi.
2. Melakukan pelatihan-pelatihan, workshop, seminar, tempat belajar mengajar, penelitian, magang dalam bidang peternakan sapi
3. Meningkatkan kesejahteraan petani ternak sapi.
4. Mendayagunakan potensi SDA yang melimpah.
5. Meningkatkan kualitas kelembagaan kelompok ternak sapi.
6. Melakukan pendampingan dalam akses permodalan baik melalui lembaga pembiayaan berupa Koperasi, BUMN, maupun perbankan.

Pola pemeliharaan sapi yang dilakukan anggota ASPIN sepenuhnya diserahkan tiap-tiap orang masing-masing yang tergabung dalam kelompok, baik pola pembibitan (2 kelompok) dan sebagian besar melaksanakan penggemukan dengan menerapkan pola penggemukkan selama 3 – 6 bulan. Berdasarkan data Dinas Peternakan dan Perikanan Boyolali populasi sapi potong tahun 2012 sebanyak 98.248 ekor dengan asumsi 42% nya (41.246 ekor) merupakan sapi potong betina. Dari 41.246 ekor betina tersebut, 70% populasinya merupakan asektor (betina produktif) atau sekitar 28.884 ekor. Target pelayanan inseminasi buatan 30.000 dosis per tahun dengan tenaga inseminator 92 orang, misalnya target kelahirannya 50% saja akan diperoleh 14.000 ekor pedet per tahunnya. Dari jumlah itu 50%nya berupa calon betina produktif, sisanya 7.000 ekor merupakan calon sapi potong dan siap dipotong setelah dipelihara minimal 2 tahun.

Asuransi Ternak Sapi (ATS)

Kegiatan peluncuran produk asuransi ternak sapi yang dilakukan pemerintah tersebut merupakan launching dan langkah uji coba implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 di lapangan, Kelompok-kelompok yang menerima polis ATS disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Nama Kelompok Yang Mendapat Polis ATS dan dalam Proses Aesment

No	Nama Kelompok dan Kota	Status Ternak Sapi	
		Mendapat Polis (ekor)	Proses Aesment (ekor)
1	Koperasi Warga Mulya, DIY	23	-
2	ASPIN Boyolali Jawa Tengah	40	-
3	PT Sari Husada, DIY	-	180
4	Perusahaan Pekan Baru, Kepri	-	200
5	Kelompok Fadila Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat	-	82
6	Kelompok Jaya Mandiri, Padang Pariaman Sumatera Barat	-	100

Sumber : Purwono, S. (2013)

ASPIN satu-satunya wadah kelompok tani ternak di Jawa Tengah yang telah menerima polis ATS, sebagai bentuk perhatian pemerintah memberikan ketenteraman dan ketenangan dalam mengelola serta meningkatkan efisiensi usaha. Bahkan berkat kiprahnya dalam kegiatan penggemukkan sapi, ASPIN sering mendapat peran sebagai nara sumber, tempat magang para peternak sapi di berbagai kesempatan. Seperti belum lama ini mendapat undangan dari Kementerian Pertanian menghadiri perayaan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-33 di Kota Padang Sumatera Barat, 31 Oktober 2013. Pada event tersebut, Suparno selaku Ketua Umum ASPIN menerima polis ATS yang diserahkan langsung Menteri Pertanian, Bapak Suswono kepada sebagai bentuk proteksi, kepastian dan kenyamanan usaha.

Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia, Halim Alamsyah mengatakan bahwa karakteristik usaha sektor pertanian, khususnya sub sektor budidaya dan pembibitan sapi dianggap beresiko tinggi karena sifat biologis yang rentan terhadap serangan penyakit dan kematian sehingga dapat menyebabkan kerugian. Adanya alasan tersebut mengakibatkan masih rendahnya penyaluran kredit di sektor usaha peternakan sapi. Berdasar data Bank Indonesia pada Agustus 2013 menunjukkan bahwa kredit bank umum untuk sektor pertanian mencapai Rp. 158, 5 triliun. Dari jumlah tersebut, hanya Rp. 11,7 triliun atau hanya 7,35 persen untuk sektor peternakan budidaya. Dengan adanya manajemen resiko dalam bentuk asuransi ternak tersebut diharapkan ke depan penyerapan kredit untuk sektor peternakan dapat lebih ditingkatkan. Dengan demikian adanya ATS memberikan kepastian dan kenyamanan usaha yang dijalani petani peternak.

Ternak sapi yang dapat diasuransikan adalah sapi indukan betina yang kepemilikannya dibiayai fasilitas kredit skim KUPS atau non KUPS dengan cara membayar premi bagi

peserta asuransi pola swadaya ditetapkan untuk sapi potong sebesar Rp. 200.000 per ekor per tahun dari harga pertanggungan induk sapi sebesar Rp. 10.000.000 per ekor. Sedangkan untuk sapi perah, preminya sebesar Rp. 300.000 per ekor per tahun dari harga pertanggungan induk sapi perah sebesar Rp. 15.000.000. Resiko yang dijamin berupa kematian sapi karena sakit, kehilangan karena adanya tindakan pencurian atau tindak kekerasan serta kecelakaan dan kematian karena melahirkan.

Di awal ASPIN berdiri, baru mampu mengakses dana yang disediakan perbankan sebesar Rp. 5.135.000.000 untuk sembilan kelompok dari 23 kelompok tani ternak yang bergabung, Nama-nama kelompok anggota ASPIN tertera pada tabel 2.

Sampai dengan bulan Mei 2014 jumlah kelompok tani ternak telah bergabung dalam ASPIN sebanyak 56, yang berasal dari 8 (delapan) dari 19 wilayah kecamatan (Nogosari, Simo, Andong, Sambi, Musuk, Ngemplak, Teras dan Ampel) se Kabupaten Boyolali. Namun baru 2 (dua) kelompok yang mengikuti ATS yaitu atas nama kelompok tani ternak Sumber Makmur Desa Banyuanyar Ampel dan Dewi Andhini Desa Kenteng Kecamatan Nogosari. Dana yang mampu diserap untuk mendukung usaha tersebut telah mencapai Rp.

21.971.500.000 yang difasilitasi perbankan yang ada di Boyolali dan Solo Raya untuk 33 kelompok yang terbagi dalam bentuk skim kredit KKPE sebesar Rp 16.091.000.000 dan KUPS sebesar Rp 5.880.500.000. Tiga kelompok tidak mengajukan kredit baik KKPE maupun KUPS atas nama Plasma Mulia, Gesang Makmur II dan Keyongan Makmur. Sisanya yang 19 kelompok mengajukan kredit KKPE yang besarnya berkisar antara Rp 450.000.000 – Rp. 500.000.000 dan satu mengajukan skim kredit KUPS sebesar Rp 1.800.000.000 hingga akhir Mei 2014 belum ada yang disetujui (cair). mengajukan skim kredit KUPS sebesar Rp 1.800.000.000 hingga akhir Mei 2014 belum ada yang disetujui (cair).

Dari pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa sistem pengembalian kredit dilakukan kelompok tani ternak ke masing-masing bank penyalur kredit, baik bank Jateng, bank Mandiri, BNI maupun BRI. Sedangkan posisi ASPIN mendapat laporan jika anggotanya ada yang telah mengembalikannya sesuai kesepakatan yang dibuat di masing-masing kelompok tani ternak anggota ASPIN.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa kurang berfungsinya kelompok tani ternak yang ada antara lain disebabkan oleh pembentukan kelembagaan tersebut tidak dilakukan secara partisipatif, namun hanya didorong kepentingan sesaat (ingin mengakses bantuan) sehingga dalam melaksanakan aktif kolektifnya mengalami kendala.

Rekayasa sosial yang dilakukan dan dikembangkan di ASPIN pada usaha pembibitan dan penggemukan sapi, memberikan manfaat bahwa setiap orang dalam kelompok tani ternak yang bergabung dapat mengajukan skim kredit KKPE dan KUPS. Sistem pemeliharannya dilakukan masing-masing orang dalam kelompok secara mandiri. Sejak awal berdirinya (30 Januari 2013) ASPIN dari 23 anggota, baru sembilan kelompok tani ternak yang mengajukan kredit KKPE senilai Rp 5.135.000.000. Sampai dengan Mei 2014 jumlah kelompok tani ternak yang bergabung asosiasi ini mencapai 56 dan dana perbankan yang telah diserap ASPIN mencapai Rp 21.971.500.000.

Saran

Ada beberapa hal yang perlu dibenahi agar ASPIN sebagai pendamping kelompok tani ternak lebih berperan dalam mengakses dana perbankan dan guna mendukung swasembada daging, antara lain :

- Sistem pengembalian kredit yang dilakukan hanya diketahui masing-masing kelompok tani ternak yang bergabung dalam ASPIN, sedangkan sebagai pendamping, ASPIN belum melakukan banyak melakukan inventarisasi data yang memadai.
- Perlu peningkatan peran ASPIN dalam manajemen keuangan sehingga bukan hanya sebagai pendamping dalam mengakses dana perbankan, tetapi dapat juga dapat berfungsi sebagai pengawas pengembalian pinjaman yang dilakukan anggotanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Djiwandi, 1994. Pengaruh Dinamika Kelompok Tani Terhadap Kecepatan Adopsi Teknologi Usahatani di Kabupaten Sukoharjo. Laporan Penelitian. Tidak dipublikasikan.
- Hermanto, Swastika Dewa, K.S., 2011. Penguatan Kelompok tani : Langkah Awal Peningkatan Kesejahteraan Petani, Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 9 Nomor 4 Desember 2011, Hal. 371 – 390
- Hermanto, 2010. Pengembangan Kelembagaan Petani. Opini, Bangka Pos, 16 Januari 2010.
- Keputusan Bupati Boyolali Nomor 520/96 Tahun 2012 tentang Pengukuhan Kelompok tani, Gabungan Kelompok tani, Kelompok tani Wanita dan Kelompok tani Pemuda.
- Mosher, A.T. 1987. Menggerakkan dan Membangun Pertanian. Syarat-Syarat Pokok Pembangunan dan Modernisasi. CV Yasaguna
- Purwono, S. 2011. Beternak Sapi Masih Menguntungkan, Materi disampaikan pada pelatihan Profil Bisnis Tembakau, Sapi Perah dan Potong di Kantor Cabang BRI Boyolali tanggal 16 April 2011
- Purwono, S. 2013. ASPIN dan Asuransi Ternak Sapi (ATS), artikel pada BOYOLALI Tersenyum, Edisi II Tahun 2013
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 /Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani, Pusat Penyuluhan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian
- Pemerintah Kabupaten Boyolali, 2013. Kabupaten Boyolali Dalam Angka Tahun 2012
- Purwono, S. 2013. ASPIN dan Swasembada Daging. Naskah Dialog Interaktif Kontak Tani RRI Pro 1 Surakarta, 11 Oktober 2013
- Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- Suntoro, A.W. 2007. Petani : Pahlawan Kehidupan Yang Terabaikan. Solo Pos, 21 April 2007
- Tabloid Sinar Tani Edisi 30 Oktober – 5 November 2013 Nomor 3530 Tahun XLIV
2013. Peluncuran Produk Asuransi Ternak Sapi <http://www.bisnis.news.viva.co.id>. Pemerintah Luncurkan Program Asuransi Sapi, Untuk apa Asuransi Ini ? diunduh pada 4 November 2013
- <http://www.republika.co.id>, Indonesia Butuh Banyak Asuransi Ternak Sapi, diunduh pada 4 November 2013

Tabel 2. Kelompok tani Ternak Sapi Yang Tergabung dalam ASPIN Boyolali, 30 Januari 2013

No	NAMA KELOMPOK TERNAK	ALAMAT	KKPE (Rp.)
1	Flasma Sejahtera	Desa Guli, Nogosari, Boyolali	480.000.000
2	Sumber Makmur	Desa Kenteng, Nogosari, Boyolali	495.000.000
3	Lembu Suro	Desa Potronayan, Nogosari, Boyolali	600.000.000
4	Jati Makmur	Desa Glonggong, Nogosari, Boyolali	600.000.000
5	Ngudi Makmur	Dukuh Sambirejo Desa Keyongan, Nogosari, Boyolali	600.000.000
6	Guli Makmur	Desa Guli, Nogosari, Boyolali	
7	Lembu Mulyo	Desa Bendo, Nogosari, Boyolali	
8	Sumber Mulyo	Desa Pojok, Nogosari, Boyolali	
9	Gesang Makmur	Dukuh Sumurwaru, Desa Keyongan Nogosari	500.000.000
10	Sumber Rejeki	Gondangrawe, Andong, Boyolali	
11	Mandiri Sejahtera	Desa Kopen Teras Boyolali	
12	Ngudi Makmur	Sentul Keyongan Nogosari Boyolali	600.000.000
13	Manuggal Jaya Abadi	Sombokeling, Potronayan, Nogosari	
14	Rembun II	Mojo, Rembun Nogosari	
15	Plasma Mulia	Dk Pilangsari Potronayan, Nogosari, Boyolali	
16	Rojo Koyo	Tegalgi, Nogosari,	600.000.000
17	Rukun Makmur	Kalikijing, Potronayan Nogosari	660.000.000
18	Ngudi Mulyo	Gunung Londo, Kenteng, Nogosari	
19	Pojok II	Pojok, Nogosari, Boyolali	
20	Glonggong Mulyo	Jangkungan, Glonggong, Nogosari	
21	Maroko	Donohudan, Ngemplak, Boyolali	
22	Manunggal Makmur	Lemah Abang Keyongan	
23	Plasma Perkasa	Keyongan Nogosari Boyolali	
Jumlah			5.135.000.000

Tabel 3. Nama Kelompok dan Besarnya Dana KKPE dan KUPS Yang Terserap sampai dengan Mei 2014

No	Nama Kelompok	Alamat	Sumber Pembiayaan		Besarnya Kredit (Rp.000)	Fasilitasi Bank	Jumlah Ternak
			KKPE	KUPS			
1	Sumber Makmur	Bibis, Kenteng Nogosari	KKPE	-	495.000.	B. Jateng	69
2	Flasma Sejahtera	Karanglo, Guli Nogosari	KKPE	-	480.000	B. Jateng	36
3	Lembu Suro	Pilangsari Potronayan Nogosari	KKPE	-	600.000	B. Jateng	75
4	Jati Makmur	Jatirejo Glonggong Nogosari	KKPE	-	600.000	B. Jateng	36
5	Gesang Makmur	Sumurwaru Keyongan Nogosari	KKPE	-	500.000	B. Jateng	36
6	Sari Tani II	Badan Tegalsari Nogosari	KKPE	-	550.000	B. Jateng	48
7	Lembu Mulyo	Bendo Nogosari	KKPE	-	480.000	B. Jateng	27
8	Ngudi Mulyo	Gununglondo Kenteng Nogosari	KKPE	-	500.000	B. Jateng	69
9	Rojo Koyo	Tegalgiri, Tegalgiri Nogosari	KKPE	-	600.000	BRI	40
10	Rukun Makmur	Potronayan Nogosari	KKPE	-	660.000	BRI	72
11	Dewi Andini	Kenteng Nogosari	-	KUPS	1.680.500	BNI	135
12	Sumber Makmur	Banyuanyar Ampel	-	KUPS	4.200.000	Mandiri	480
13	Ngudi Makmur	Glonggong Nogosari	KKPE	-	600.000	BRI	45
14	Lembu Joyo	Sanggrahan Potronayan	KKPE	-	400.000	BRI	38
15	Barokah	Bekangan Sembungan	KKPE	-	400.000	BRI	32
16	Manunggal Jaya Abad	Sombokeling Nogosari	KKPE	-	550.000	BRI	58
17	Langgeng Sehati	Guli Nogosari	KKPE	-	470.000	BRI	30
18	Harapan Mulyo	Sukomulyo Keyongan	KKPE	-	500.000	BRI	35
19	Margo Dadi	Grenjeng Kenteng	KKPE	-	450.000	BRI	36
20	Bina Usaha Modern	Derasan Sempu Andong	KKPE	-	600.000	B. Jateng	37
21	Rembun II	Rembun Nogosari	KKPE	-	400.000	BRI	36
22	Bangun Tani II	Sempol Potronayan Nogosari	KKPE	-	500.000	B. Jateng	38
23	Bakalan Agung	Bakalan Kenteng Nogosari	KKPE	-	550.000	B. Jateng	35
24	Ngudi Makmur 2	Sentul Keyongan Nogosari	KKPE	-	400.000	BRI	25
25	KTT Lembu Raharjo	Glonggong Nogosari	KKPE	-	450.000	BRI	30
26	KTT Ngudi Rejeki	Sentul Keyongan Nogosari	KKPE	-	500.000	BRI	37
27	KTT Lembu Agung	Sudimoro Teras	KKPE	-	500.000	BRI	40
28	Taruban Mulya	Taruban Kenteng Nogosari	KKPE	-	450.000	BRI	27
29	Sido Mulyo	Manggung Ngemplak	KKPE	-	500.000	BRI	26
30	Ngudi Mulyo	Jeponan Manggung Ngemplak	KKPE	-	500.000	BRI	29
31	KTT Lembu Mulyo	Teras, Teras	KKPE	-	936.000	BRI	38
32	KTT Sido Tani 2	Pelem Simo	KKPE	-	470.000	BRI	27
33	Tani Subur	Kadipaten Andong	KKPE	-	500.000	BRI	32
34	Plasma Mulia	Pilangsari Potronayan Nogosari	-	-	-	-	69
35	Margo Dadi II	Ngablak Kenteng Nogosari	-	-	-	-	24
36	Sapi Subur	Bekangan Sembungan Nogosari	-	-	-	-	25
37	Sari Rejeki	Wates, Wates, Simo	-	-	-	-	25
38	Sumber Sapi Makmur	Sumber Simo	-	-	-	-	23
39	Maroko	Donohudan Ngemplak	-	-	-	-	20
40	Sumber Mulyo	Dilem Pojok Nogosari	-	-	-	-	20
41	KTT Ngudi Makmur	Ngumbul Glonggong Nogosari	-	-	-	-	23
42	KTT Jati Luhur II	Glonggong Nogosari	-	-	-	-	26
43	Sugih Tani II	Bulu Tegalgiri Nogosari	-	-	-	-	21
44	Rejo Mulyo	Sruni Musuk	-	-	-	-	37
45	Karya Tani	Karanganyar Musuk	-	-	-	-	77

PROSPEK PENGEMBANGAN TERNAK SAPI DAN KERBAU DI KABUPATEN PEMALANG Mendukung PROGRAM SWASEMBADA DAGING



Nurul Ashar

Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Pemalang
Email : nurul.ashar@gmail.com

Abstrak

Pengembangan ternak ruminansia besar (sapi dan kerbau) di Kabupaten Pemalang akan berdampak terhadap menurunnya pasokan daging sapi dan kerbau dari luar daerah, menyediakan ternak siap potong dan memberikan kesempatan kerja yang lebih luas pada masyarakat. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk melihat arah dan potensi pengembangan ternak sapi dan kerbau di Kabupaten Pemalang. Mendasarkan pada potensi dan layanan kelembagaan yang ada menunjukkan bahwa ternak sapi dan kerbau di Kabupaten Pemalang dicirikan oleh populasi lebih rendah dari ketersediaan pakan, sehingga merupakan salah satu daerah yang mengalami surplus pakan ternak. Memperhatikan hal tersebut, maka Kabupaten Pemalang mempunyai peluang cukup strategis dalam peningkatan populasi sapi dan kerbau. Selain itu, populasi ternak sapi dan kerbau masih terkonsentrasi pada kecamatan daerah lereng

Gunung Slamet kawasan Agropolitan Waliksarimadu sehingga masih perlu pengembangan ke daerah potensi lainnya. Melihat potensi yang ada, maka dapat dikatakan bahwa pengembangan usaha ternak sapi dan kerbau di Kabupaten Pemalang cukup prospektif. Belum optimalnya pemanfaatan sumber pakan serta lemahnya SDM dan sistem perbibitan merupakan permasalahan dalam pengembangan ternak, sehingga arah pengembangan ternak sapi dan kerbau di Kabupaten Pemalang sebaiknya dilakukan melalui pendekatan kelompok dan integrasi dengan tanaman sehingga ada keterkaitan saling mendukung. Pola pendekatan ini harus ditopang melalui peningkatan populasi ternak serta perbaikan dalam sistem perbibitan.

Kata kunci : Prospek, pengembangan, sapi dan kerbau, Kabupaten Pemalang

PENDAHULUAN

Pemerintah saat ini sedang berjuang keras untuk mewujudkan swasembada daging tahun 2014. Dalam kenyataannya banyak kendala yang harus dihadapi baik secara internal dan eksternal. Keberhasilan program ini sangat tergantung dukungan penuh dari seluruh stakeholder dan pemangku kebijakan. Keberhasilan dalam mencapai swasembada daging sapi akan turut serta berperan membantu menciptakan kemandirian pangan dan ketahanan pangan.

Swasembada daging khususnya daging sapi pada tahun 2014 perlu didukung semua pihak, karena permintaan daging sapi umumnya di Indonesia selama beberapa tahun terakhir terus meningkat dan telah melebihi kemampuan produksi daging sapi dalam negeri. Menurut Sodik, A. (2010) upaya untuk mendukung swasembada daging sapi adalah dengan pengendalian pemotongan betina produktif, perbaikan mutu dan penyediaan bibit, pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan peternak serta program pendukung lainnya.

Perkembangan usaha sapi potong saat ini memperlihatkan hasil yang cukup mengembirakan bahkan melebihi hasil perkiraan. Hal tersebut berdasarkan sensus yang dilakukan oleh Pemerintah tahun 2011 menunjukkan dengan jelas rumah tangga peternak di Indonesia seluruhnya mencapai 15,24 juta orang. Dari jumlah tersebut, 5,9 juta merupakan peternak sapi, 13,51 juta peternak sapi potong, 529.000 peternak sapi perah dan rumah tangga peternak kerbau mencapai 1,2 juta. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan populasi sapi potong sebagian besar berada di rumah tangga peternak yang umumnya hanya memiliki sapi dalam jumlah 2-5 ekor (<http://m.koransindo.com>, 2013). Namun sayangnya perkembangan populasi sapi potong tersebut belum diimbangi peningkatan bobot potong yang sesuai standar.

Pembangunan peternakan diarahkan pada pencapaian tujuan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan peternak, mewujudkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya ternak, kelembagaan dan budidaya lokal, meningkatkan daya saing produk peternakan dan ekspor hasil peternakan dan pengembangan aktivitas ekonomi perdesaan serta peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha secara adil melalui agribisnis peternakan (Bappeda, 2014). Peternakan rakyat berskala kecil terus didorong agar mencapai skala usaha ekonomi dengan perbaikan produktivitas dan kualitas sedang peternakan besar dijadikan mitra untuk memberdayakan peternak kecil.

Pengembangan peternakan merupakan suatu integrasi antara kawasan peternakan dengan komponen lainnya secara bersinergi antar berbagai komponen yang mampu memberikan berbagai informasi dan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kawasan produksi peternakan, baik untuk pelayanan yang berhubungan dengan sarana produksi, jasa distribusi maupun pelayanan sosial ekonominya (Bappeda, 2010). Untuk mendukung pembangunan peternakan tersebut perlu mengoptimalkan potensi kawasan perdesaan mengingat perdesaan merupakan penyedia sumberdaya peternak, sumber pakan dan tempat populasi ternak berkembang.

Basis pembangunan pertanian khususnya peternakan adalah pembangunan perdesaan. Oleh karena itu, pembangunan perdesaan pada daerah-daerah pemasok hasil produksi peternakan (daerah sentra produksi ternak) melalui pengembangan Daerah Pusat Pertumbuhan (DPP) perlu lebih dimantapkan agar memiliki ketahanan yang lebih kuat mengingat fungsi daerah perdesaan sangat penting terutama dalam hal: a) penyediaan bahan pangan untuk penduduk b) penyedia tenaga kerja untuk pembangunan c) penyedia bahan baku untuk industri d) penghasil komoditi untuk diekspor keluar negeri (BPSDP Kementan, 2002).

Dalam memfasilitasi pembangunan perdesaan khususnya dalam upaya Kawasan Pusat Pertumbuhan (KPP), difokuskan untuk mengoptimalkan fungsi peternakan yang ada dalam suatu kawasan. Mendasarkan pada hal tersebut, maka perlu dilakukan dengan membangkitkan ketersediaan sumber daya yang ada dengan harapan mampu berperan untuk menjadi pendorong dan pengelola agribisnis peternakan, sehingga tercipta peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menghapus kesenjangan pendapatan antara masyarakat di perdesaan. Untuk menghadapi tantangan dan situasi yang semakin kompleks, maka pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menjalankan kebijakan dan strategi pembangunan perdesaan merencanakan dibidang peternakan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan melalui pengembangan agribisnis peternakan (Bappeda, 2010)

Kecukupan Daging

Program swasembada daging sapi dan kerbau 2014 yang dicanangkan oleh Kabinet Indonesia Bersatu II masih banyak tantangan dan kendala yang dikarenakan kebutuhan dan ketersediaan yang tidak seimbang. Menurut Menteri Pertanian pada tahun 2014 produksi daging sapi lokal sebesar 430.000 dari kebutuhan 450.000 ton sehingga masih kekurangan 110.000 ton walaupun terjadi pertumbuhan produksi daging sebesar 23 % (<http://Kompas.com>, 2013). Kebutuhan daging terus akan naik sejalan dengan peningkatan pendapatan dan jumlah penduduk.

Impor merupakan sebuah peluang, menandakan potensi pasar masih terbuka lebar membutuhkan ternak sapi dan kerbau yang cukup banyak serta sarana prasarana pendukung lainnya untuk mencukupinya. Menurut Hatmono, H (2010) untuk mencukupi kebutuhan daging harus dilakukan peningkatan produksi ternak potong dengan mengembangkan tiga aspek agribisnis yaitu dukungan teknologi, pengembangan fisik dan kualitas sumberdaya manusia. Teknologi merupakan perangkat pendukung utama dalam rangka meningkatkan efisiensi produksi untuk memperbaiki daya saing. Pengembangan fisik memberikan fasilitas ketersediaan factor-faktor produksi, sedangkan kualitas sumberdaya manusia merupakan kunci penentu keberhasilan usaha.

Pola Pengembangan Ternak

Peluang pasar meskipun masih terbuka lebar dan menjanjikan belum dapat dimanfaatkan dengan secara optimal. Hal tersebut disebabkan karena produktivitas ternak ruminansia besar (sapi dan kerbau) kebanyakan masih rendah karena sistem pemeliharaan yang kurang intensif dan pemberian pakan yang hanya mengandalkan rumput lapang atau hijauan saja (Ernawati, dkk. 2010). Secara klasik diteorikan bahwa keberhasilan budidaya ternak bergantung pada bibit, pakan dan manajemen. Bibit yang bagus atau bermutu merupakan sebuah potensi saja, tanpa pemberian pakan yang baik juga tidak akan menghasilkan daging yang optimal. Walaupun bibitnya bagus, pakan baik, jika manajemennya tidak baik juga tidak akan memberikan hasil dan pendapatan yang memadai (Hatmono, H. 2010).

Peternakan khususnya peternakan ruminansia besar (sapi dan kerbau) merupakan sumberdaya hayati penghasil daging yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan menempati posisi strategis di dalam kehidupan masyarakat. Ternak sapi dan kerbau bagi masyarakat memiliki banyak fungsi terutama sebagai penghasil daging, tenaga kerja, pupuk dan tabungan (Bappeda, 2014).

Pengembangan ternak dengan pola sederhana dengan lahan yang sempit integrasi ternak dan tanaman merupakan sebuah pilihan yang menguntungkan. Menurut Haryanto, B. (2003) integrasi ternak dengan tanaman pangan dimaksudkan untuk efisiensi penggunaan lahan dalam upaya peningkatan pendapatan.

Integrasi ternak dengan tanaman sudah terjadi sejak petani mengenal pertanian. Saat ini petani tanaman pangan terutama tanaman padi menghadapi kendala ketersediaan pupuk serta kesuburan lahan yang merosot. Melalui kotoran ternak penggunaan pupuk anorganik dapat ditekan sekaligus mengembalikan kesuburan tanah. Sapi mampu menghasilkan pupuk organik 7,3 – 11 ton/th. Sementara itu untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas lahan diperlukan 2 ton pupuk organik setiap musim

Gambaran Umum Kabupaten Pemalang

Kondisi geografis

Wilayah Kabupaten Pemalang memiliki topografi lengkap mulai dari daerah pantai hingga pegunungan dengan luas wilayah mencapai 1.115,3 Km² yang terbagi dalam 14 wilayah kecamatan dan meliputi 222 desa/kelurahan. Berdasarkan topografinya, Kabupaten Pemalang terdiri dari : daerah dataran pantai dengan ketinggian antara 1-5 meter diatas permukaan air laut dengan luas 9% dari luas wilayah meliputi 18 desa dan 1 kelurahan berada dibagian utara ; daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 6-15 meter diatas permukaan air laut dengan luas 46% meliputi 98 desa dan 5 kelurahan di bagian utara ; daerah dataran tinggi dengan ketinggian 16 – 212 meter diatas permukaan air laut dengan luas 16 % meliputi 35 desa berada di bagian tengah dan selatan ; daerah pegunungan dengan ketinggian 213 – 924 meter diatas permukaan air laut dan daerah pegunungan dengan ketinggian lebih dari 924 meter dengan luas 29% meliputi 65 desa diwilayah diwilayah bagian selatan (BPS Kabupaten Pemalang 2013).

Menurut Junghuhn Secara umum tipe iklim diwilayah Kabupaten Pemalang adalah tipe iklim sedang (di atas ketinggian 600 - 1500 mdpl) dan tipe iklim panas (ketinggian 0 - 600 mdpl) (Anjayani, E.2009). Selanjutnya berdasarkan data curah hujan, maka banyaknya hari hujan dan curah hujan tertinggi diperoleh pada bulan Januari dan terendah pada bulan Agustus. Kemudian temperatur antara daerah pegunungan sampai daerah pesisir serta kemarau dan hujan tidak banyak berbeda berkisar antara 25°C s.d 30°C. (BPS Kabupaten Pemalang 2013). Data Curah hujan selama empat tahun terakhir sejak tahun 2010 sampai 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Data hari hujan (hh) dan curah hujan (mm) Kabupaten Pemalang selama.

No	Bulan	2010		2011		2012		2013	
		Hari Hujan	Curah Hujan						
1	Januari	25	471	25	755	24	765	24	803
2	Februari	21	616	21	616	17	480	18	469
3	Maret	19	279	19	756	16	350	16	313
4	April	17	221	17	707	12	251	17	325
5	Mei	14	98	14	295	8	183	12	181
6	Juni	2	11	2	36	3	41	3	53
7	Juli	5	0	5	88	24	22	22	221
8	Agustus	0	37	0	1	0	1	11	24
9	September	3	26	3	94	1	28	3	22
10	Oktober	10	369	10	221	7	180	2	112
11	Nopember	18	403	18	398	10	295	13	174
12	Desember	20	439	20	560	19	424	18	425

Sumber : BPS Kabupaten Pemalang 2011/2014.

Kondisi topografi dan iklim yang bervariasi tersebut berpengaruh pada produksi pertanian dan peternakan. Di daerah pesisir, sektor pertanian tanaman pangan menghasilkan padi dan palawija, serta mangga. Sedangkan di daerah dataran tinggi dan pegunungan sebagai sentra hortikultura penghasil sayur mayur dan buah-buahan.

Komoditas ternak unggulan di daerah pesisir berupa itik, ayam buras, kambing domba, sedang pada dataran rendah ternak kerbau. Di daerah tengah sampai pegunungan komoditas ternak unggulan berupa sapi potong, kambing, dan domba. Budidaya ternak sapi potong menurut

Williamson dan Payne (1993) cocok dipelihara pada suhu 23,3° C sampai 26,7° C. Selain iklim, yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pengembangan sapi potong adalah ketersediaan hijauan pakan ternak. Sarana lain yang ikut menunjang pengembangan sapi potong adalah sarana pemasaran, inseminasi buatan dan kesehatan ternak.

Potensi Ternak Ruminansia

Jenis ternak ruminansia yang dipelihara masyarakat Kabupaten Pemalang cukup bervariasi di berbagai kecamatan, karena perbedaan daya dukung wilayah. Trend populasi selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2

Tabel 2 Trend populasi ternak ruminansia di Kabupaten Pemalang tahun 2011 - 2013 (ekor).

No	Jenis Ternak	2011	2012	2013	Ket
1	Sapi Perah	20	5	0	menurun
2	Sapi Potong	10.205	11.427	12.180	meningkat
3	Kerbau	6.744	8.876	9.498	meningkat
6	Kambing	137.142	148.854	156.296	meningkat
7	Domba	33.654	35.414	36.476	meningkat

Sumber : BPS Kabupaten Pemalang 2013 dan Dinas Pertanian dan Kehutanan 2011/2013.

Peningkatan populasi khususnya sapi potong antara lain juga disebabkan oleh peningkatan motivasi peternak dalam budidaya sapi potong. Peningkatan populasi mencerminkan peningkatan produksi daging.

Perkembangan produksi daging selama kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3

Tabel 3 Produksi daging ternak ruminansia mulai tahun 2011 – 2013 (Kg).

No	Jenis Ternak	2011	2012	2013	Trend
		Produksi	Produksi	Produksi	
1	Sapi	592.721	701.613	712.386	Meningkat
2	Kerbau	497.964	426.724	443.394	Meningkat
3	Kambing	424.016	429.792	447.024	Meningkat
4	Domba	178.830	193.515	201.284	Meningkat

Sumber : Dipertanhu 2014.

Pengembangan ternak di Kabupaten Pemalang diarahkan pada konsep agribisnis terpadu yang melibatkan sektor hulu sampai hilir, memaksimalkan potensi yang ada dan mengembangkan potensi yang belum muncul.

Sapi Potong

Perkembangan sapi potong di Kabupaten Pemalang memang belum menggembirakan, populasinya masih kalah dengan kabupaten tetangga seperti Kabupaten Pekalongan, Purbalingga dan Banyumas. Namun dengan potensi lahan serta daya dukung lahan seperti luas sawah 38.694.186 ha, tegalan/kebun 17.951.865 ha, ladang 233.092 ha, hutan 33.197.151 ha, perkebunan 1.815.701 ha (BPS Pemalang 2011) yang kesemuanya mendukung ketersediaan pakan, maka peluang untuk pengembangannya masih cukup terbuka dan peluang sebagai pusat pertumbuhan baru pengembangan sapi potong juga cukup menjanjikan.

Populasi ternak sapi potong selama kurun waktu empat tahun terakhir mengalami pasang surut namun peningkatannya masih lebih dari 5%. Data perkembangan ternak sapi potong mulai selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 4.

Populasi ternak sapi potong menyebar hampir disetiap wilayah kecamatan, namun yang paling dominan pada daerah kawasan kecamatan Agropolitan Waliksarimadu (Watukumpul, Warungpring, Belik, Pulosari, Moga dan Rاندudongkal) dimana suhu dan kondisi agroekosistemnya sesuai dengan perkembangan ternak. Berdasarkan data-data yang ada, maka usaha peternakan sapi potong memiliki peluang yang cukup baik dalam memenuhi kebutuhan daging secara lokal, regional maupun nasional. Kabupaten Pemalang

Tabel 4 Perkembangan populasi sapi potong per kecamatan dari tahun 2010-2013 (ekor).

No	Kecamatan	2010	2011	2012	2013
1	Moga	394	594	648	701
2	Warungpring	479	354	414	441
3	Pulosari	1.487	551	668	711
4	Belik	2.055	3.222	3.562	3.793
5	Watukumpul	2.892	2.626	2.996	3.191
6	Bodeh	557	966	1.012	1.077
7	Bantarbolang	539	950	900	959
8	Randudongkal	528	391	564	601
9	Pemalang	66	57	65	69
10	Taman	76	76	134	142
11	Petarukan	11	59	87	93
12	Ampelgading	112	205	196	209
13	Comal	31	63	86	91
14	Ulujami	41	91	96	102
Jumlah		9.268	10.205	11.428	12.180
Pertumbuhan			10,1%	12%	6,6%

Sumber : Dipertanhut Kab. Pemalang 2014

dengan masyarakat agrarisnya serta aksesibilitas yang dimilikinya yang hanya berjarak 135 Km dari Provinsi terletak di jalur pantura berpeluang untuk menjadi pusat pertumbuhan baru peternakan sapi potong.

Perkembangan populasi ternak sapi potong jauh melampaui target capaian kinerja sebagai yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2011-2016 (Bappeda, 2011). Terjeda capaian dan perkembangan ternak kerbau selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada data berikut ini.

Kerbau

Kegairahan masyarakat Kabupaten Pemalang untuk memelihara kerbau masih lumayan tinggi di semua wilayah meskipun tingkat pertumbuhannya cenderung menurun dan perannya mulai tergantikan oleh sumber daging lainnya utamanya daging sapi. Berikut ini tabel yang menggambarkan perkembangan ternak kerbau dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.

Aktivitas budidaya kerbau di Kabupaten Pemalang merata di semua kecamatan walaupun terdapat kesenjangan antar kecamatan. Ternak kerbau mempunyai kemampuan yang tinggi dalam mencerna serat kasar. Terjadinya silent heat (birahi tidak kentara) pada kerbau menyebabkan pengembangannya lambat.

Ternak kerbau bagi masyarakat Kabupaten Pemalang mempunyai peranan penting dalam tradisi dan masakan. Budaya membeli kerbau pada berbagai acara adat dan tradisi serta kuliner khas Pemalang yang menggunakan daging kerbau sebagai bahan utamanya menunjukkan ternak kerbau mendapat tempat khusus di hati masyarakat Pemalang (Bappeda, 2010). Walaupun kecenderungan perkembangan populasi ternak kerbau terus menurun, namun bila dibandingkan target capaian kinerja setiap tahun mulai tahun 2011 sampai 2013 (Bappeda, 2011) masih lebih tinggi. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Kontribusi ternak kerbau dalam penyediaan daging cukup besar. Jumlah pemotongan kerbau pada tahun 2013 sebesar 1.449 ekor baik yang dipotong di RPH, di luar RPH dan yang tidak tercatat dengan produksi daging 443.494 kg. Kerbau yang dipotong di Rumah Pemotongan Hewan Randudongkal, Pemalang, dan Comal sebanyak 483 ekor, diluar RPH 517 ekor dan yang tidak tercatat 449 ekor (Dipertanhut, 2014)

Hijauan

Hijauan pertanian merupakan pakan utama ternak ruminansia baik berupa hijauan segar maupun limbah pertanian. Sumber hijauan yang dapat dipergunakan sebagai pakan sapi potong diperoleh dari kebun rumput, padang rumput, lahan hutan dan perkebunan yang tidak dipergunakan untuk lahan pertanian, tegalan serta lahan yang tidak dipergunakan untuk kepentingan lain. Sumber pakan lainnya adalah limbah pertanian tanaman pangan dan palawija serta limbah hasil ikutan industri pertanian.

Potensi ketersediaan dan kebutuhan pakan serta potensi pengembangan ternak per kecamatan se Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Mendasarkan data yang tertera pada tabel 6, terlihat bahwa ketersediaan hijauan pakan ternak 1.150.666,50 ton/bahan kering sedang kebutuhannya 464.272,46 ton/bahan kering sehingga masih ada potensi pengembangan ternak sebesar 47.063,9 UT.

Pengembangan ternak khususnya ternak ruminansia besar masih terbuka luas di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Pulosari karena pengembangan ternak belum diimbangi perkembangan produksi hijauan pakan. Wilayah kecamatan lainnya sangat potensial sebagai pusat pertumbuhan baru budidaya ternak karena masih banyak sumber pakan baik berupa limbah pertanian tanaman pangan maupun perkebunan yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Daya Dukung Kelembagaan

Kelembagaan petanin

Pengembangan ternak tidak dapat terlepas dari keberadaan kelembagaan peternak itu sendiri karena pada hakekatnya dalam pengembangan ternak kunci utamanya pada kemampuan petani dalam mengelola ternak. Kelompok Tani ternak di Kabupaten Pemalang memiliki andil yang sangat besar dalam memajukan dan mensejahterakan petani. Kelompoktani tani ternak di Kabupaten Pemalang terbagi dalam kelompok tani per komoditas dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah kelompok sapi tersebut terus berkembang seiring dengan kebijakan pemerintah yang mendorong penggunaan pupuk kompos untuk budidaya tanaman pangan dan horikultura dalam rangka mendukung program pertanian organik guna mengembalikan kesuburan lahan dan keamanan pangan. Pemerintah melalui Kementan memberikan bantuan Unit Produksi Pupuk Organik (UPPO) pada kelompok berupa dana untuk pengadaan sapi betina dan sarana pendukungnya. Dukungan pemerintah provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pemalang dalam mambantu petani peternak melalui Bantuan Sosial (Bansos) diarahkan untuk pembelian ternak sapi betina. Hal tersebut dimaksudkan agar populasi meningkat, perbibitan skala kecil dapat berjalan dan pemanfaatan pupuk dilahan pertanian dapat ditingkatkan.

Pemasaran

Peternak Sapi potong dan kerbau wilayah pemalang memasarkan ternaknya melalui pasar lokal dan regional. Pasar lokal di Kabupaten Pemalang berada di Pasar Hewan

Randudongkal yang ramai pada hari Rabu dan Minggu, sedang pasar regional di Luar Kabupaten Pemalang yaitu Pasar Hewan Purbalingga, Pasar Hewan Kajen, Pasar Hewan Sokaraja, Pasar Hewan Banjarnegara, Pasar Hewan Slawi.

Pasar merupakan sarana untuk penjualan dan pembelian ternak sekaligus tempat informasi harga ternak. Pasar yang memadai dengan fasilitas yang mencukupi seperti timbangan ternak, pemeriksaan hewan dan pertokoan sarana peternakan (sapronak) akan sangat membantu perkembangan ternak.

Fasilitas internet dan kelembagaan pemerintah serta swadaya banyak dijumpai. Berbagai sarana tersebut menyediakan akses teknologi dan pemasaran. Informasi teknologi dan harga ternak yang mudah diakses akan ikut memacu motivasi perkembangan budidaya ternak. Namun sayangnya beberapa fasilitas yang tersedia seperti timbangan ternak jarang dimanfaatkan oleh peternak dan pedagang, karena masih menyukai menjual dan membeli secara taksir demikian juga akses teknologi dan harga hanya sebagian yang melakukan.

Layanan Penyuluhan

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang tahun 2014 terdapat 68 penyuluh PNS dan 58 THL-TBPP, 14 petugas peternakan kecamatan (mantri ternak) yang bertugas di 14 kecamatan. Tenaga teknis Inseminator di 14 kecamatan. Pemeriksa Kebuntingan/Asisten Teknis Reproduksi sebanyak 4 orang. (Dipertanhut Pemalang, 2014).

Layanan penyuluhan dimaksudkan untuk meningkatkan SDM peternak dan kemampuan kelembagaan peternak dalam mengadopsi perkembangan teknologi dan mengikuti informasi pasar. Layanan yang diberikan meliputi sapta usaha peternakan dan pemberdayaan kelompok.

Layanan Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan

Pengembangan sapi potong memerlukan peran serta tenaga medis. Petugas dokter hewan di Kabupaten Pemalang terdapat 5 dokter hewan dengan penempatan tugas di Pos Kesehatan Hewan 1 orang, Dinas Pertanian dan Kehutanan 2 orang dan layanan dokter hewan swasta 2 orang. Tenaga dokter hewan tersebut mendapat dukungan 14 mantri ternak yang tersebar di setiap wilayah kecamatan se Kabupaten Pemalang. Layanan dokter hewan dan mantri ternak penting untuk penanganan ternak yang sakit, penanganan gangguan reproduksi, dan pelayanan kesehatan hewan lainnya (Dipertanhut Pemalang, 2014).

Pelayanan Inseminasi buatan dilakukan oleh 17 inseminator yang tersebar di seluruh kecamatan. Layanan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas bibit sehingga pertumbuhan cepat dan harapannya produksi dagingnya meningkat.

KESIMPULAN

- Melihat kecenderungan kondisi usaha peternakan di Kabupaten Pemalang , maka secara umum prospek pengembangan usaha ternak sapi dan kerbau di Kabupaten Pemalang dapat dilihat dari beberapa aspek seperti: (a) kondisi geografis (b) potensi kebutuhan daging dan (c) ketersediaan pakan.
- Upaya peningkatan produksi sapi dan kerbau dipengaruhi juga oleh kelembagaan petani dan layanan pertanian dalam mendukung perkembangan ternak. Kelembagaan petani yang maju akan memiliki dampak terhadap perkembangan populasi ternak dan kualitas ternak..
- Berkembangnya usaha intensifikasi pertanian yang diikuti oleh usaha-usaha agroindustri menyebabkan adanya ketersediaan limbah sebagai pakan ternak. Dengan memanfaatkan teknologi pakan yang tersedia akan mampu mengubah limbah menjadi pakan yang bermanfaat untuk pengembangan ternak.
- Arah pengembangan ternak sapi dan kerbau di Kabupaten Pemalang sebaiknya dilakukan melalui pendekatan integrasi dengan tanaman sehingga terdapat siklus yang



- saling berkaitan. Kebijakan pengembangan ternak harus dapat dipilah berdasarkan lokasi (ketersediaan sumberdaya pakan, agroekologi dan sosial budaya masyarakat, serta produk unggulan yang akan dihasilkan). Pengembangan ternak sapi dan kerbau saat ini sebagian besar dilakukan oleh peternak kecil yang kebanyakan hanya mengharapkan bantuan pemerintah dan belum banyak tersentuh oleh perbangan. Oleh karena itu perlu intervensi pemerintah agar peternak dapat mengakses permodalan untuk meningkatkan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjayani, E. 2009. Geografi Untuk Kelas X SMA/MA. PT. Cempaka Putih. Jakarta.
- Bappeda Pemalang, 2002. Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Pedoman Rintisan Pengembangan Kawasan Agropolitan, Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, Departemen Pertanian, Jakarta.
- , 2010. Penyusunan Data Informasi dan Master Plan Pengembangan Kawasan Peternakan Di Kabupaten Pemalang.
- , 2014. Studi Kelayakan Investasi Usaha Penggemukan Sapi Secara Intregitas di Kabupaten Pemalang.
- , 2011. Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016.
- BPS, 2011. Kabupaten Pemalang Dalam Angka 2011. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang
- , 2012. Kabupaten Pemalang Dalam Angka 2012. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang
- , 2013. Kabupaten Pemalang Dalam Angka 2013. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang
- , 2014. Kabupaten Pemalang Dalam Angka 2014. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang
- Dipertanhut Pemalang, 2011. Laporan Tahunan Bidang Peternakan Dipertanhut Kabupaten Pemalang.
- , 2012. Laporan Tahunan Bidang Peternakan Dipertanhut Kabupaten Pemalang.
- , 2013. Laporan Tahunan Bidang Peternakan Dipertanhut Kabupaten Pemalang.
- , 2014. laporan Tahunan Bidang Peternakan Dipertanhut Kabupaten Pemalang.
- Ernawati, dkk. 2010. Pedoman Teknis Budidaya Sapi Potong. BPTP. Ungaran Jawa Tengah.
- Haryanto, B. 2003. Menejemen pemeliharaan Sapi dalam Pola CLS Lahan Kering. Materi disampaikan pada Teknis Program Litkaji Pola CLS di Lahan Kering Sukamandi 30 Juni – juli 2003
- Hatmono, H. 2010. Model Usaha Agribisnis Sapi Pedaging. PT. Duta Karya Swasta. Jakarta
- <http://m.koran-sindo.com>. 2013. Swasembada Daging Sapi Bukan Mimpi.. Diunduh tanggal 11 Juli 2014.
- <http://2013.kompas.com>. Indonesia Masih Kekurangan Daging 40.000 ton Daging Sapi. Diunduh tanggal 11 Juli 2014.
- Sodiq, A. 2010. Pengembangan Sapi Potong : Implementasi Program Sarjana Membangun Desa Tahun 2008. Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- Williamson, G dan W.J.A. Payne. 1993. Pengantar Peternakan di Daerah Tropis. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta



